

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN, PDRB  
PERKAPITA, DAN UPAH MINIMUM  
TERHADAP *HUMAN DEVELOPMENT INDEX*:  
STUDI KASUS 12 PROVINSI DENGAN KATEGORI *LOWER MEDIUM*  
DI INDONESIA**

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN  
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI  
DEPARTEMEN ILMU EKONOMI  
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN**



**DIAJUKAN OLEH:  
AMIRUL ZAMHARIR  
NIM:041011183**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2016**

**SKRIPSI**

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN, PDRB  
PERKAPITA, DAN UPAH MINIMUM TERHADAP HUMAN  
DEVELOPMENT INDEX: STUDI KASUS 12 PROVINSI DENGAN  
KATEGORI LOWER MEDIUM DI INDONESIA**

**DIAJUKAN OLEH:**

**AMIRUL ZAMHARIR**

**NIM: 041011183**

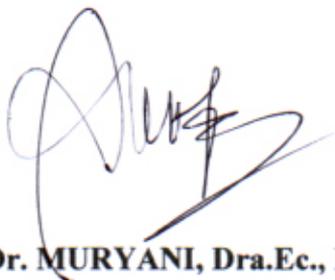
**TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH:  
DOSEN PEMBIMBING,**



**Dr. Hj. SITI UMAJAH MASJKURI, SE**

**TANGGAL.....**

**KETUA PROGRAM STUDI,**



**Dr. MURYANI, Dra.Ec., MSi., MEMD**

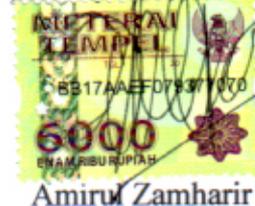
**TANGGAL.....**

### PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya Amirul Zamharir (041011183) menyatakan bahwa :

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun diperguruan tinggi lain.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 10 Agustus 2016



Amirul Zamharir

(041011183)

## DECLARATION

I, Amirul Zamharir (041011183), declare that:

1. My thesis is genuine and truly my own creation, and is not another's person work made under my name, and not piracy or plagiarism. This thesis has never been submitted to obtain an academic degree in Airlangga University or in any other universities.
2. This thesis does not contain any work or opinion written or published by anyone, unless clearly acknowledged or referred to by quoting the author's name and stated in references.
3. This statement is true, if on the future this statement is proven to be fraud and dishonest, I agree to receive an academic sanction in the form of removal of degree obtained through this thesis and other sanctions in accordance with the prevailing norms and regulations in Airlangga University.

Surabaya, 10 Agustus 2016



Amirul Zamharir

(041011183)

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur yang sangat mendalam penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, PDRB Perkapita, dan Upah Minimum Terhadap *Human Development Index* : Studi Kasus 12 Provinsi Dengan Kategori *Lower Medium Di Indonesia*”**. Shalawat dan Salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis mendapat bimbingan, pengarahan, serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu, Iswatul Muniroh dan Ayah, Muaji. Terima kasih atas segala curahan cinta, kasih sayang, pengorbanan, doa serta dukungan dalam bentuk motivasi, materi dan kesabaran selama proses perkuliahan yang selalu diberikan dan tak kenal lelah. Terima kasih juga untuk adik penulis Lucky Muwaffiq Asyafa' yang sudah mendoakan penulis selama proses penulisan skripsi.

2. Ibu Dr. Hj. Siti Umajah Masjkuri, SE. selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu, memberikan ilmu, arahan, dan bimbingan.
3. Ibu Prof. Dr.Hj. Dian Agustia, SE.,M.Si.,Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.
4. Ibu Dr. Muryani, Dra.Ec., MSi., MEMD. selaku Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.
5. Ibu Dyah Wulansari selaku dosen wali penulis dan Seluruh staf pengajar program studi Ekonomi Pembangunan yang telah mentransfer ilmu dan membantu kelancaran studi penulis.
6. Seluruh staf karyawan di Departemen Ilmu Ekonomi yang telah membantu kelancaran studi penulis.
7. Seluruh staf dan karyawan perpustakaan Kampus B Unair dan ruang baca FEB Unair yang memberikan kemudahan dalam pengumpulan referensi dan data untuk perampungan skripsi ini.
8. Semua Sahabat The Bandit, Iqbal, Helmi, Fajar, Norman, Zainal dan Nala terima kasih untuk semua pelajaran, cinta, kehangatan, canda, tawa dan semua pengalaman serunya selama ini yang diberikan kepada penulis.
9. Seluruh sahabat Warung Pes (WP) dan Sekumpulan Anak Alam Ekonomi Pembangunan (SALEP) , Irfan, Aji, Boim, Dicky, Igoy, Pendik, Dimas, Dodi, Lhutfi, Gama, Rifki, Jalmo, Ariansyah, Otonk, Iam, Ridho, Pram,Gondrong, Rama, Yudha, Anka, Komprenng, Cindy,Ketut,Popo, Putri,

Ann, Arin, Pelangi Alam, Raka, Tian, Agus, Fahd dll. terima kasih telah memberi hiburan dan kesan dalam perjalanan hidup kepada penulis.

10. Teman-teman seperjuangan EP angkatan 2010 dan 2011 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaan dan kegembiraan selama di kampus.
11. Spesial untuk M iqbal tawakal (murit bapak yang paling rajin ngajakin belajar PES dan FIFA) beserta ibunda, Ibu Urianti atas bantuan, perhatian, tempat, makanan, semangat, bimbingan, dan segalanya yang sangat berperan dalam penyelesaian penelitian ini.
12. Alvin Maha Gayus Tambunan beserta CV. MGP (mitra gayus prima). Swun gae sekabeane, Ndang rabi.
13. Buat pihak-pihak lain yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dan tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran demi penyempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini berguna untuk menambah pengetahuan pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Surabaya, 10 Agustus 2016

Amirul Zamharir

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA

PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN

DAFTAR No :

**ABSTRAK**

**SKRIPSI SARJANA EKONOMI**

NAMA : AMIRUL ZAMHARIR

NIM : 041011183

TAHUN PENYUSUNAN : 2016

**JUDUL:**

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN, PDRB PERKAPITA, DAN UPAH MINIMUM TERHADAP *HUMAN DEVELOPMENT INDEX*: STUDI KASUS 12 PROVINSI DENGAN KATEGORI *LOWER MEDIUM* DI INDONESIA

**ISI:**

Pencapaian pembangunan ekonomi dapat dilihat pada keberhasilan pembangunan manusia. *United Nation Development Program* (UNDP) (2008) membuat indikator *Human Development Index* untuk mengukur perkembangan pembangunan manusia. *Human delopment index* di 12 provinsi Indonesia perlu dianalisis sebab masih termasuk kategori *lower-medium*. Tujuan penelitian ini yaitu menguji dan menganalisis pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, PDRB perkapita, dan upah minimum secara parsial dan simultan terhadap *human development index* di 12 provinsi dengan kategori *lower medium*. Metode yang digunakan adalah regresi data panel. Kesimpulan yang diperoleh yaitu secara simultan variabel pertumbuhan ekonomi, *poverty*, PDRB per kapita, dan upah minimum berpengaruh signifikan terhadap *human development index* di 12 provinsi Indonesia dengan kategori *lower medium* sedangkan secara parsial pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, dan upah berpengaruh signifikan terhadap *human development index* di 12 provinsi Indonesia dengan kategori *lower medium*.

**Kata Kunci:** Pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, PDRB perkapita, dan upah minimum, *human development index*, regresi data panel

STATE MINISTRY OF RESEARCH AND TECHNOLOGY

FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS AIRLANGGA UNIVERSITY

STUDY PROGRAM : DEVELOPMENT ECONOMICS

LIST NUMBER :

**ABSTRACT**

**GRADUATE ECONOMICS THESIS**

NAME : AMIRUL ZAMHARIR

NIM : 041011183

ARRANGED YEAR : 2016

**TITLE:**

EFFECT OF ECONOMIC GROWTH , POVERTY , GDP PER CAPITA AND MINIMUM WAGE ON HUMAN DEVELOPMENT INDEX : CASE STUDY BY CATEGORY LOWER MEDIUM 12 PROVINCE IN INDONESIA

**CONTENT:**

The achievement of economic development can be seen in the success of human development. United Nation Development Program (UNDP) (2008) made the Human Development Index indicators to measure progress in human development. Human development index in 12 provinces in Indonesia have to be analyzed because they include lower-medium category. The purpose of this study is to test and analyze the economic growth, poverty, GDP per capita, and minimum wages partially and simultaneously on the human development index in 12 provinces with lower medium category. The method used is the panel data regression. The conclusion that is simultaneously variable economic growth, poverty, the GDP per capita, and minimum wages have a significant effect on the human development index in 12 provinces of Indonesia with a category lower medium while partially economic growth, the GDP per capita, and wages are also a significant effect on human development index in 12 provinces of Indonesia with lower medium category.

**Key words:** Economic growth , poverty , GDP per capita , and minimum wages, human development index , panel data regression.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan Skripsi .....	ii
Halaman Pernyataan Orisinilitas Skripsi .....	iii
Declaration .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Abstrak .....	viii
Abstract .....	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel .....	xiii
Daftar Gambar.....	xiv
Daftar Lampiran.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan Penelitian .....	12
1.4 Manfaat Penelitian .....	12
1.5 Sistematika Penulisan Skripsi .....	13
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
2.1 Landasan Teori.....	15
2.1.1 Teori Modal Manusia .....	15
2.1.2 Biaya dan Manfaat Peningkatan Modal Manusia.....	18

2.1.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	21
2.1.3.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Adam Smith.....	21
2.1.3.2 Teori Pertumbuhan Harrod Domar .....	22
2.1.3.3 Teori Pertumbuhan Solow.....	24
2.1.3.4 Teori Pertumbuhan Endogen.....	26
2.1.4 Teori Lingkaran Perangkap Kemiskinan.....	29
2.1.5 Teori Efisiensi Upah.....	32
2.1.6 Konsep Human Development Index.....	34
2.1.7 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan <i>Human Development Index</i> .....	37
2.1.8 Hubungan Kemiskinan dengan <i>Human Development Index</i> .....	39
2.1.9 Hubungan PDRB per Kapita dengan <i>Human Development Index</i> .....	40
2.1.10 Hubungan Upah Minimum dengan <i>Human Development Index</i> .....	42
2.2 Penelitian Terdahulu .....	43
2.3 Hipotesis Penelitian dan Model Analisis .....	46
2.3.1 Hipotesis Penelitian .....	46
2.3.2 Model Analisis.....	47
2.4 Kerangka Berpikir.....	47
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN.....</b>	<b>50</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	50
3.2 Identifikasi Variabel.....	50
3.3 Definisi Operasional.....	50
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	53

3.5	Prosedur Pengumpulan Data .....	53
3.6	Teknik Analisis .....	54
3.6.1	Metode Regresi Data Panel .....	54
3.6.2	Pemilihan Model Estimasi Dalam Data Panel.....	57
3.6.3	Pengujian Statistik .....	58
<b>BAB 4</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>61</b>
4.1	Gambaran Umum Variabel Penelitian .....	61
4.1.1	<i>Human Development Index</i> .....	61
4.1.2	Pertumbuhan Ekonomi .....	63
4.1.3	Kemiskinan .....	65
4.1.4	PDRB Per Kapita .....	67
4.1.5	Upah Minimum.....	68
4.2	Analisis Model dan Pembuktian Hepotesis .....	70
4.2.1	Pemilihan Model Estimasi Data Panel .....	70
4.2.2	Identifikasi Model Terpilih Regresi Data Panel .....	70
4.2.3	Uji T Untuk Model Regresi Data Panel Terpilih.....	71
4.2.4	Uji F Untuk Model Regresi Data Panel Terpilih.....	73
4.2.5	Pembuktian Hepotesis .....	73
4.3	Pembahasan.....	75
<b>BAB 5</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>83</b>
5.1	Simpulan .....	83
5.2	Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

## DAFTAR TABEL

2.1 Rata-Rata <i>Human Development Index</i> 33 Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2014.....	3
3.1 Jenis Data dan Sumber Data .....	54
4.1 Perkembangan <i>Human Development Index</i> di Provinsi Indonesia dengan Kategori <i>Lower-Medium</i> (Satuan Persen) .....	62
4.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Indonesia dengan Kategori <i>Lower-Medium</i> (Satuan Persen) .....	64
4.3 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Indonesia dengan Kategori <i>Lower-Medium</i> (Satuan Jiwa).....	66
4.4 Perkembangan PDRB perKapita di Provinsi Indonesia dengan Kategori <i>Lower-Medium</i> (Satuan Dalam Ribu Rupiah).....	68
4.5 Perkembangan Upah Minimum di Provinsi Indonesia dengan Kategori <i>Lower-Medium</i> (Satuan Dalam Ribu Rupiah) .....	69
4.6 Hasil Pemilihan Model Regresi Panel .....	70
4.7 Hasil Estimasi FEM .....	71

## DAFTAR GAMBAR

1.1 Rata-Rata <i>Human Development Index</i> 12 Provinsi di Indonesia yang Termasuk Kategori <i>Lower-Medium</i> (Satuan Persen).....	5
2.1 Hubungan Tingkat Pendidikan dan Pendapatan .....	16
2.2 Biaya dan Manfaat Individual.....	19
2.3 Manfaat dan Biaya .....	20
2.4 Kenaikan Tingkat Pertumbuhan Penduduk Menggeser Steady State Dalam Pertumbuhan Neoklasik.....	26
2.5 Lingkaran Setan Kemiskinan Versi Nurkse.....	32
2.6 Komponen Pembentukan Index Pembangunan Manusia.....	36
2.7 Kerangka Berfikir.....	49

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Hasil Uji PLS .....	90
2. Hasil Uji FEM.....	90
3. Hasil Uji REM .....	91
4. Hasil Uji Hausman.....	91



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pencapaian pembangunan ekonomi dapat dilihat pada keberhasilan pembangunan manusia. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai suatu proses untuk perluasan pilihan yang lebih banyak kepada penduduk melalui upaya-upaya pemberdayaan yang mengutamakan peningkatan kemampuan dasar manusia agar dapat sepenuhnya berpartisipasi disegala bidang pembangunan (BPS, 2011). Pembangunan manusia menjadi isu penting dalam pembangunan ekonomi karena menyangkut kualitas manusia sehingga perlu mendapat perhatian. Ada 2 alasan yang mendasari pembangunan manusia perlu mendapat perhatian (Ginting dkk, 2008). Pertama, banyak negara berkembang yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun gagal mengurangi kesenjangan pembangunan manusia. Kedua, sumberdaya manusia sebagai input dalam proses pertumbuhan ekonomi, jika pembangunan manusia berhasil maka kualitas sumberdaya manusia semakin baik sehingga dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

*United Nation Development Program* (UNDP) (2008) membuat indikator *Human Development Index* untuk mengukur perkembangan pembangunan manusia. *Human Development Index* mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar, yang digunakan sebagai indikator yaitu (i) bidang kesehatan: usia hidup; (ii) bidang pendidikan: pengetahuan (*knowledge*); dan (iii) bidang ekonomi: standar hidup layak (*decent living*) (Faqihudin, 2008). UNDP membedakan tingkat *human development index*

berdasarkan empat klasifikasi yakni: *low* (HDI<50%), *lower-medium* (HDI antara 50% dan 65,99%), *upper-medium* (HDI antara 66 dan 79,99) dan *high* (HDI 80 ke atas) (Ginting dkk., 2008). Tujuan pengukuran HDI yaitu membangun indikator yang mengukur dimensi dasar pembangunan manusia dan perluasan kebebasan memilih, memanfaatkan sejumlah indikator untuk menjaga ukuran tersebut sederhana, dan menciptakan ukuran mencakup aspek sosial dan ekonomi (Wicaksono, 2014).

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (Suliswanto, 2010). Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dapat diperlihatkan melalui meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Peningkatan pengetahuan dan keahlian akan mampu mendorong peningkatan produktivitas suatu negara sehingga berdampak pada kinerja perekonomian (Suliswanto, 2010).

Beberapa faktor penting dalam pembangunan yang sangat efektif bagi pembangunan manusia adalah pendidikan dan kesehatan (BPS, 2008). Pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia yang perlu dimiliki agar mampu meningkatkan potensinya. Semakin tinggi kapabilitas dasar yang dimiliki suatu bangsa, semakin tinggi pula peluang untuk meningkatkan potensi bangsa. Tuntutan terhadap kapabilitas dasar dirasakan semakin tinggi, jika tidak menjadi tuntutan maka bangsa tersebut akan kalah bersaing dengan bangsa-bangsa lain yang lebih maju (BPS, 2008).

Peningkatan *human development index* tidak hanya didorong oleh pertumbuhan ekonomi sebab pertumbuhan ekonomi merupakan syarat perlu bagi

*human development index* sehingga pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan syarat cukup yaitu pemerataan pembangunan (BPS, 2008). Adanya pemerataan pembangunan terdapat jaminan bahwa semua penduduk dapat menikmati hasil-hasil pembangunan. Kondisi pemerataan pembangunan yang tercapai akan mendorong akselerasi *human development index* (Wicaksono, 2014).

**Tabel 1.1.**  
**Rata-Rata Human Development Index 33 Provinsi di Indonesia**  
**Tahun 2011-2014**

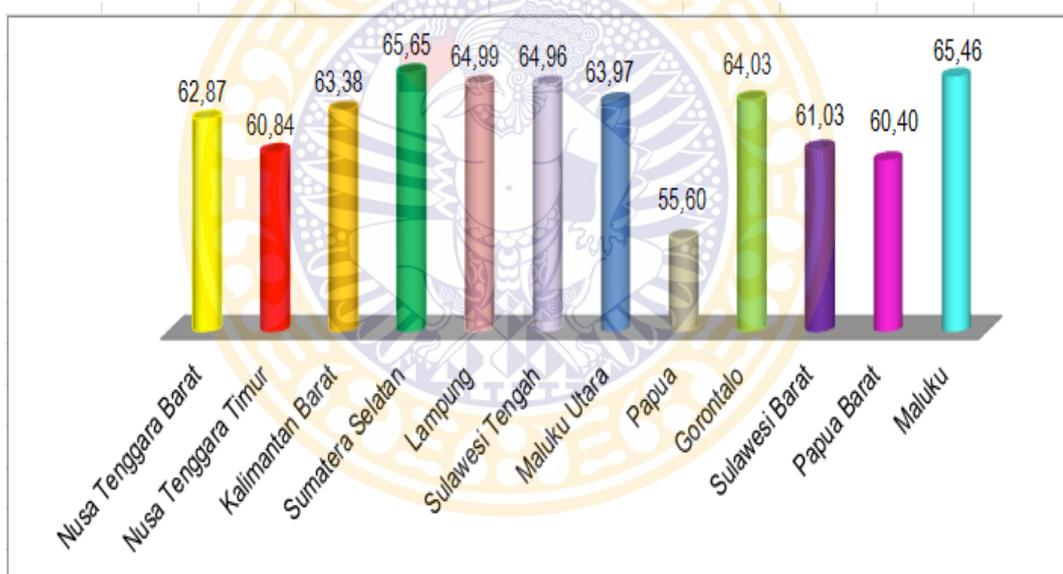
Provinsi	Rata-Rata HDI	Keterangan	Provinsi	Rata-Rata HDI	Keterangan
Aceh	67,89	<i>Upper Medium</i>	Banten	68,81	<i>Upper Medium</i>
Sumatera Utara	67,88	<i>Upper Medium</i>	Bali	71,43	<i>Upper Medium</i>
Sumatera Barat	68,34	<i>Upper Medium</i>	Nusa Tenggara Barat	62,87	<i>Lower Medium</i>
Riau	69,39	<i>Upper Medium</i>	Nusa Tenggara Timur	60,84	<i>Lower Medium</i>
Jambi	66,89	<i>Upper Medium</i>	Kalimantan Barat	63,38	<i>Lower Medium</i>
Sumatera Selatan	65,65	<i>Lower Medium</i>	Kalimantan Tengah	66,84	<i>Upper Medium</i>
Bengkulu	66,70	<i>Upper Medium</i>	Kalimantan Selatan	66,51	<i>Upper Medium</i>
Lampung	64,99	<i>Lower Medium</i>	Kalimantan Timur	72,60	<i>Upper Medium</i>
Kep. Bangka Belitung	67,20	<i>Upper Medium</i>	Sulawesi Utara	68,93	<i>Upper Medium</i>
Kepulauan Riau	72,30	<i>Upper Medium</i>	Sulawesi Tengah	64,96	<i>Lower Medium</i>
DKI Jakarta	77,46	<i>Upper Medium</i>	Sulawesi Selatan	67,26	<i>Upper Medium</i>
Jawa Barat	67,44	<i>Upper Medium</i>	Sulawesi Tenggara	67,04	<i>Upper Medium</i>
Jawa Tengah	67,35	<i>Upper Medium</i>	Gorontalo	64,03	<i>Lower Medium</i>
D.I. Yogyakarta	76,14	<i>Upper Medium</i>	Sulawesi Barat	61,03	<i>Lower Medium</i>
Maluku Utara	63,97	<i>Lower Medium</i>	Papua Barat	60,40	<i>Lower Medium</i>
Papua	55,60	<i>Lower Medium</i>	Maluku	65,46	<i>Lower Medium</i>
Jawa Timur	66,77	<i>Upper Medium</i>			

Sumber: BPS, 2015

**Tabel 1.1** halaman 3 menunjukkan rata-rata *human development index* 33 provinsi di Indonesia tahun 2011-2014. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Rata-rata *human development index* di setiap provinsi tahun 2011-2014 berbeda-beda, Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Indonesia terjadi ketimpangan dan ketidak merataan. Rata-rata *human development index* di setiap provinsi tahun 2011-2014 di Indonesia berbeda-beda disebabkan oleh perbedaan komponen pembentuk *human development index* seperti angka harapan hidup, perbedaan rata-rata lama sekolah, dan standar hidup layak di masing-masing provinsi (BPS, 2014).

**Tabel 1.1** halaman 3 juga menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Indonesia termasuk kategori *lower-medium* dan *upper-medium*. Pembangunan manusia kategori *lower-medium* antara lain provinsi Sumatera Selatan, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Maluku, Gorontalo, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tengah, serta provinsi Lampung sedangkan dua puluh satu provinsi lainnya di Indonesia memiliki pembangunan manusia kategori *upper-medium*. *Human development index* yang termasuk kategori *lower-medium* pada dua belas provinsi di Indonesia menghadapi masalah angka harapan hidup rendah, kualitas pendidikan rendah, dan daya beli masyarakat rendah. Solusi untuk meningkatkan *human development index* dibidang pendidikan seperti (1) program pemberantasan buta aksara; (2) ketersediaan sarana perpustakaan sekolah dan laboratorium; (3) Jumlah guru diperbanyak lebih dari dua kali lipat dari murid (Mailendra, 2009). Solusi meningkatkan *human development index* di bidang kesehatan seperti (1) sarana

kesehatan diperbanyak; (2) meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat; (3) meningkatkan kualitas lingkungan sehat dan perilaku hidup sehat, (4) meningkatkan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan (Mailendra, 2009). Solusi peningkatan *human development index* dibidang ekonomi antara lain: (1) kebijakan penanggulangan kemiskinan; (2) kebijakan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin; (3) kebijakan peningkatan kesempatan kerja; (4) kebijakan mengembangkan industri, perdagangan, pertanian, perikanan, kelautan dan pariwisata (Mailendra, 2009).



Sumber: BPS, 2014

**Gambar 1.1.**  
**Rata-Rata *Human Development Index* 12 Provinsi di Indonesia yang Termasuk Kategori *Lower-Medium* Tahun 2011-2014 (satuan persen)**

**Gambar 1.1.** menunjukkan provinsi Papua memiliki *human development index* paling rendah dibandingkan sebelas provinsi lainnya. *Human development index* di provinsi Papua secara rata-rata dari tahun 2011-2014 sebesar 55,89%. Rendahnya nilai *human development index* di Papua karena kurangnya peranan

pemerintah untuk meningkatkan pembangunan manusia mencakup ketiga dibidang yaitu: pendidikan, ekonomi, dan kesehatan pada Provinsi Papua serta ditambah dengan jumlah penduduk miskin masih banyak. Papua memiliki sumber daya alam yang sangat besar sehingga provinsi Papua seharusnya mampu bersaing untuk meningkatkan *human development index* dengan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Solusi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Papua untuk mengejar ketertinggalan HDI dengan provinsi lain yaitu dengan cara (1) mengurangi tingkat kematian ibu melahirkan, bayi, dan serta menjamin kecukupan nutrisi pada penduduk bayi dan balita; (2) penyediaan lapangan kerja yang sesuai dengan karakteristik tenaga kerja dengan cara membangun industri pengolahan berbasis sumber daya lokal; (3) meningkatkan alokasi belanja pendidikan, terutama untuk daerah pegunungan dan daerah sulit akses; (4) meningkatkan tambahan belanja kesehatan untuk daerah pegunungan (BPS, 2013).

Pertumbuhan ekonomi sekarang dipandang sebagai variabel yang memiliki peranan menggerakkan dan mendorong pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia memiliki keterkaitan dan saling berkontribusi satu sama lain (Anggraini, 2012). UNDP (2011) mengungkapkan bahwa kualitas pembangunan manusia dapat mengalami peningkatan apabila didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan diimbangi dengan pemerataan pendapatan sehingga pertumbuhan ekonomi akan sangat efektif untuk memperbaiki pembangunan manusia. Kontribusi pertumbuhan ekonomi untuk pembangunan manusia melalui pendapatan pemerintah sehingga

peningkatan pendapatan pemerintah yang kemudian dapat diinvestasikan untuk pembangunan manusia (Anggraini, 2012).

Kemiskinan menjadi masalah dalam pembangunan yang dapat mempengaruhi *Human Development Index*. Kemiskinan juga dapat menjadikan efek yang cukup serius bagi pembangunan manusia karena masalah kemiskinan merupakan sebuah masalah yang kompleks yang sebenarnya bermula dari kemampuan daya beli masyarakat yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokok sehingga kebutuhan yang lain seperti pendidikan dan kesehatanpun terabaikan (Mirza, 2012). Hal tersebut menjadikan *gap* pembangunan manusia diantara keduanya pun menjadi besar dan pada akhirnya target capaian IPM yang ditentukan oleh pemerintah menjadi tidak terealisasi dengan baik.

Indikator kesejahteraan penduduk suatu daerah yakni PDRB per kapita (Pratiwi dan Sutrisna, 2014). Norton (2002) menyatakan bahwa apabila pertumbuhan PDRB per kapita tinggi berarti terdapat lebih banyak pekerjaan yang lebih baik dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi, Secara ekonomi makro, PDRB per kapita dapat mempengaruhi *human development index*. Peningkatan PDRB per kapita akan meningkatkan standar hidup layak masyarakat sehingga daya beli juga mengalami peningkatan. Peningkatan daya beli berdampak pada peningkatan *human development index*.

Kebijakan upah minimum merupakan sistem pengupahan yang telah banyak diterapkan di beberapa negara, yang pada dasarnya bisa dilihat dari dua sisi (Sulistiawati, 2012). Pertama, upah minimum merupakan alat proteksi bagi pekerja untuk mempertahankan agar nilai upah yang diterima tidak menurun

dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, alat proteksi bagi perusahaan untuk mempertahankan produktivitas pekerja (Simanjuntak, 1992 dalam Gianie, 2009). Upah minimum regional merupakan komponen dari pendapatan seseorang yang tinggal di suatu daerah sehingga tingkat upah merupakan salah satu indikator yang dapat mencerminkan kesejahteraan masyarakat dari suatu negara. Peningkatan upah minimum regional akan meningkatkan kebutuhan hidup layak sehingga standar hidup layak juga mengalami peningkatan. Akibat peningkatan upah minimum yang diterima, daya beli masyarakat mengalami peningkatan sehingga berdampak positif pada *human development index*. Upah minimum juga merupakan salah satu pertimbangan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di suatu daerah terutama investor yang ingin mendirikan pabrik atau industri yang banyak menyerap tenaga kerja. Semakin tinggi upah minimum regional suatu daerah menunjukkan semakin tinggi tingkat ekonominya (Bappeda. 2010).

Hukom (2015) melakukan penelitian tentang indeks pembangunan manusia periode 2006-2013 di provinsi Kalimantan Tengah. Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Hukom (2015) yaitu mendeskripsikan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2006-2013 dan menganalisis pengaruh tingkat belanja modal, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi data panel. Variabel dependen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sedangkan tingkat belanja modal,

pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan sebagai variabel independen. Hasil yang diperoleh yaitu belanja modal berpengaruh positif dan signifikan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Tengah, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Tengah, dan tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Tengah.

*Human development index* dalam penelitian ini dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita, kemiskinan, dan upah minimum. Pertumbuhan ekonomi dijadikan variabel yang mempengaruhi *human development index* karena pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai variabel yang memiliki peranan menggerakkan dan mendorong pembangunan manusia. PDRB perkapita juga dijadikan variabel yang mempengaruhi *human development index* karena PDRB per kapita sebagai ukuran standar hidup layak sehingga menjadi variabel yang diperhitungkan dalam mempengaruhi *human development index*. Kemiskinan menjadi masalah dalam pembangunan yang dapat mempengaruhi *human development index* sehingga kemiskinan dapat dijadikan variabel yang mempengaruhi *human development index*. Upah minimum regional merupakan komponen dari pendapatan seseorang yang dapat mempengaruhi *human development index* melalui peningkatan daya beli.

*Human development index* 12 Provinsi di Indonesia yang termasuk kategori *lower-medium* perlu diberi perhatian lebih oleh pemerintah pusat maupun daerah dibanding dengan 21 provinsi Indonesia yang termasuk dalam kategori *upper medium*, karena 21 provinsi yang termasuk dalam kategori *upper medium*

menggambarkan tingkat *Human development index* ditingkat yang cukup baik dan tidak mengkhawatirkan, sedangkan 12 provinsi yg termasuk dalam kategori lower medium menghadapi masalah yang sangat mengkhawatirkan karena tingkat *Human development index* 12 provinsi tersebut dalam kategori rendah dan mengkhawatirkan, maka dari itu perlu perhatian lebih dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk meningkatkan dan mendorong *Human development index* 12 provinsi tersebut agar dapat menyusul ketertinggalan dari 21 provinsi lainnya yang berada dalam kategori *upper medium*.

Pada penelitian ini diputuskan untuk menggunakan data rata-rata *human development index* pada periode 2011-2014 karena pada tahun 2011-2014 BPS sudah menggunakan metodologi perhitungan *human development index* yang baru. Dua alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM (BPS, 2015). Pertama, angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan karena secara utuh tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan sehingga diganti dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik. Selai itu, PDB per kapita diganti dengan PNB per kapita karena PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat suatu wilayah. Kedua, penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah disuatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

Berdasarkan latar belakang studi ini, *human delopment index* di 12 provinsi Indonesia perlu dianalisis sebab masih termasuk kategori *lower-medium*. Faktor penyebab *human delopment index* di 12 provinsi Indonesia yaitu angka harapan hidup rendah, kualitas pendidikan rendah, dan daya beli masyarakat rendah. Terdapat beberapa alasan yang mendasari dilakukannya penelitian ini. Pertama, pembangunan manusia di 12 provinsi Indonesia perlu perhatian serius pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebab nilai *human development index* di 12 provinsi masih termasuk kategori *lower-medium* sedangkan 21 provinsi Indonesia yang memiliki *human development index* pada level *upper medium* diharapkan ditingkatkan lagi sehingga 21 provinsi Indonesia memiliki *human development index* pada level *high*. Kedua, *human development index* merupakan salah satu indikator untuk melihat pencapaian pembangunan ekonomi suatu daerah.

Selanjutnya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel karena keuntungan menggunakan analisis regresi data panel yaitu jumlah data menjadi lebih banyak dan lebih efisien (Gujarati, 2012:237). Tujuan penelitian ini yaitu menguji dan menganalisis pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, PDRB perkapita, dan upah minimum secara parsial dan simultan terhadap *human development index* di 12 provinsi dengan kategori *lower medium* sehingga ditulis judul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, PDRB Perkapita, dan Upah Minimum Terhadap *Human Development Index*: Studi Kasus 12 Provinsi dengan Kategori *Lower Medium* di Indonesia”**.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi, Kemiskinan, PDRB perkapita, dan upah minimum secara simultan berpengaruh terhadap *human development index* di 12 provinsi Indonesia?
2. Apakah pertumbuhan ekonomi, Kemiskinan, PDRB perkapita, dan upah minimum secara parsial berpengaruh terhadap *human development index* di 12 provinsi Indonesia?

## 1.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, Kemiskinan, PDRB perkapita, dan upah minimum secara simultan terhadap *human development index* di 12 provinsi Indonesia.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, Kemiskinan, PDRB perkapita, dan upah minimum secara parsial terhadap *human development index* di 12 provinsi Indonesia.

## 1.3. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis, hasil penelitian diharapkan mampu menambah pengetahuan keilmuan bidang ekonomi, khususnya terkait dengan *human development index*.

2. Manfaat kebijakan, Penelitian ini diharapkan menjadi rekomendasi kebijakan pemerintah menyangkut *human development index* sehingga dapat menjadikan kebijakan yang efektif.
3. Manfaat operasional, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan *human development index*.

#### 1.4. Sistematika Skripsi

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, maka sistematika skripsi ini disusun sebagai berikut:

##### **BAB 1            PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang penulisan, rumusan permasalahan yang ditinjau, tujuan dari penelitian, manfaat yang diberikan oleh penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB 2            TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan secara terperinci teori yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas serta dikemukakan pula mengenai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, hipotesis dari permasalahan yang diteliti, dan model analisis yang digunakan berdasarkan landasan teori serta kerangka berpikir.

##### **BAB 3            METODE PENELITIAN**

Bab ini memuat tentang pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam menyelesaikan penelitian,

identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data dan teknik analisis.

#### **BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang gambaran umum tentang subyek dan obyek penelitian dalam beberapa periode. Selanjutnya mengulas dinamika dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini dan memuat analisis model, pembuktian hipotesis serta pembahasan.

#### **BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan penutup dari bab-bab sebelumnya, yang berisi kesimpulan hasil pembahasan secara menyeluruh serta saran yang dianggap perlu berkenaan untuk implementasi maupun penelitian selanjutnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## **BAB 2**

### **TINJUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

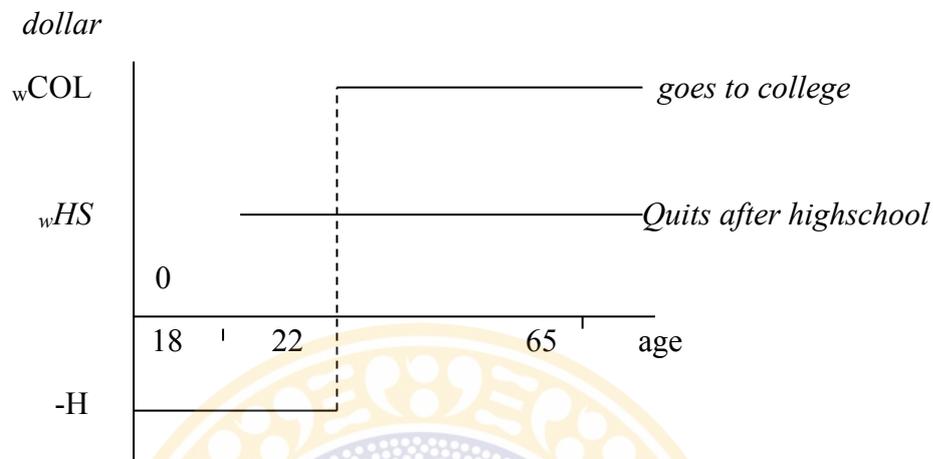
##### **2.1.1. Teori Modal Manusia**

Jhingan (2004:414) modal manusia adalah proses mendapatkan dan meningkatkan manusia yang memiliki keahlian, pendidikan, dan pengalaman yang berdampak pada pembangunan ekonomi. Menurut Schultz (2005) dalam pengembangan Sumber Daya Manusia ada 5 cara: (1) fasilitas dan layanan kesehatan yang mencakup pengeluaran untuk mempengaruhi harapan hidup, (2) pelatihan keterampilan; (3) pendidikan formal seperti tingkat dasar, menengah dan tinggi; (4) pendidikan informal seperti program pelatihan pada sektor pertanian; (5) migrasi untuk mendapatkan kesempatan kerja.

Terdapat beberapa jenis investasi yaitu melalui pendidikan, pelatihan, migrasi dan mencari pekerjaan baru dengan harapan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dikemudian hari (Ehenberg dan Smith, 2003:290). Salah satu modal manusia yang terpenting adalah pendidikan, untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi tentunya mengeluarkan biaya, dengan harapan biaya yang telah dikeluarkan tersebut dapat tergantikan dengan pendapatan yang lebih tinggi. Selain melalui pendidikan formal, investasi pendidikan juga didapatkan melalui pelatihan kerja dan juga pengalaman.

Menurut Borjas (2013) dalam bukunya *Labor Economics* menyatakan bahwa pendidikan dan pengalaman memiliki nilai dalam peningkatan pendapatan

pada masa yang akan datang. Hal tersebut dapat dijelaskan pada **Gambar 2.1.** yang disebut dengan *Schooling Mode*.



Sumber : Borjas, 2013:240

**Gambar 2.1.**  
**Hubungan Tingkat Pendidikan dan Pendapatan**

**Gambar 2.1.** menggambarkan kurva hubungan tentang pendapatan yang didapatkan menurut usia dan tingkat pendidikan. Seorang yang baru keluar dari SMA hanya akan mendapatkan upah sebesar  $w_{HS}$  ketika berumur 18 sampai akhir ia mengundurkan diri berumur 65 tahun. Apabila mereka memutuskan kembali bersekolah hingga perguruan tinggi mereka membutuhkan sebesar  $H$  dollar untuk membiayai kuliahnya selama 4 tahun dan barulah ketika mereka memasuki pasar tenaga kerja akan menerima upah sebesar  $w_{COL}$  sampai akhir masa jabatannya. Semakin tinggi pendidikan yang mereka terima maka akan semakin produktif dan memperoleh penghasilan yang lebih tinggi.

Teori *human capital* mengasumsikan bahwa seseorang akan mendapatkan tingkat kesejahteraan yang lebih baik dengan meningkatkan taraf pendidikan. Hal ini diakibatkan karena tingginya tingkat pendidikan akan memberikan peluang

untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Pekerjaan dengan tingkat upah lebih besar akan meningkatkan kesejahteraan Becker (1993). Oleh karena itu ekspektasi terhadap pekerjaan yang lebih baik diwujudkan dengan cara meningkatkan edukasi. Setiap satu tahun tambahan masa sekolah berdampak pada penambahan keterampilan dan peluang untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik, tetapi di sisi lain hal ini menunda penerimaan penghasilan seseorang selama satu tahun karena satu tahun tersebut digunakan untuk bersekolah (Becker, 1993).

*Human capital* di bidang pendidikan dapat digunakan untuk (Simanjuntak, 2001:102):

1. Sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai apakah seseorang melanjutkan atau tidak melanjutkan sekolah.
2. Untuk menerangkan situasi tenaga kerja.
3. Memperkirakan tambahan penyediaan tenaga dari masing-masing tingkat dan jenis pendidikan dalam kurun waktu tertentu.
4. Menyusun kebijakan pendidikan dan perencanaan kerja.

Menurut Becker (1993) *human capital* disusun melalui dua hal yaitu pendidikan dan pelatihan. Kedua hal ini akan meningkatkan *skill* dari seorang pekerja yang berdampak pada kebebasan kepada seseorang untuk memilih pekerjaan. *Human capital* juga menentukan produktivitas dari suatu perusahaan atau instansi. Produktivitas ini diukur berdasarkan *output* yang dapat dihasilkan oleh seorang tenaga kerja. Peningkatan kualitas *human capital* akan berdampak pada produksi output yang semakin baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

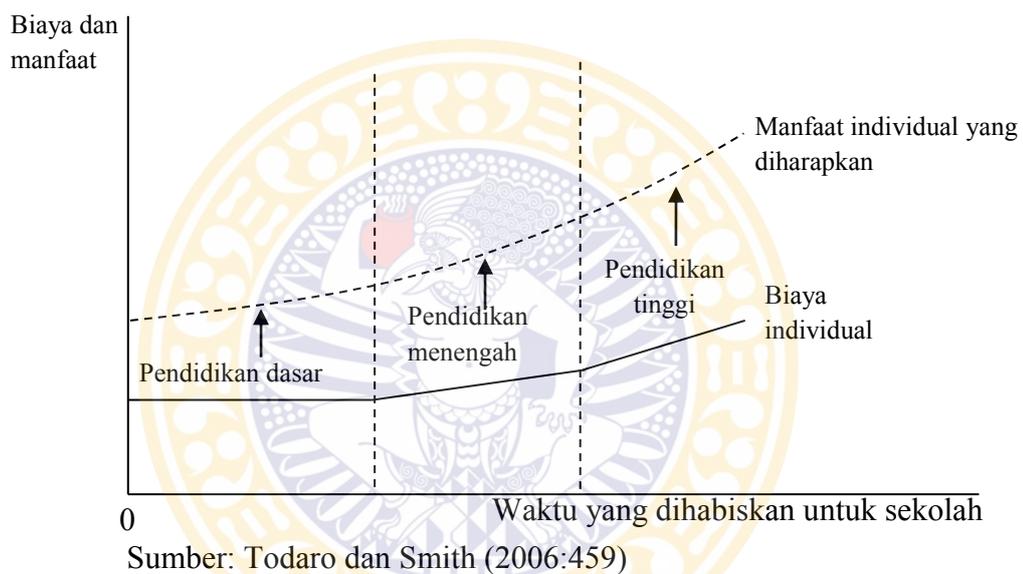
Menurut Psaacharopoulos (dikutip dalam Bellante dan Jackson, 1990:172), majikan pada umumnya mengetahui bahwa rata-rata tamatan pendidikan lebih tinggi mempunyai karakteristik individu yang relatif lebih unggul sehingga dia mempunyai penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata mereka yang berpenghasilan rendah. Pasar tenaga kerja mengutamakan tenaga kerja dengan pendidikan tinggi karena pendidikan tinggi dapat ditempatkan pada bagian tertentu dengan upah sama dengan berpendidikan rendah. Setiap individu dengan pendidikan lebih tinggi akan lebih fleksibel dalam memasuki pasar tenaga kerja.

### **2.1.2. Biaya dan Manfaat Peningkatan Modal Manusia**

Mengenai biaya dan manfaat dari peningkatan modal manusia melalui pendidikan, terdapat biaya dan manfaat individu pendidikan dan biaya dan manfaat sosial pendidikan. Todaro dan Smith (2006:455-457) menyatakan bahwa biaya-biaya pendidikan individual yakni biaya yang harus ditanggung oleh si anak didik dan keluarganya sendiri justru akan meningkat secara lebih lambat atau bahkan bisa jadi akan mengalami penurunan sedangkan manfaat pendidikan individu merupakan harapan bagi seseorang yang lebih berpendidikan untuk mendapat penghasilan yang lebih baik di masa yang akan datang.

**Gambar 2.2** halaman 19 menunjukkan semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula penghasilan yang diharapkan, sehingga lebih besar biaya individu seperti biaya kebutuhan sehari-hari yang dikeluarkan. Biaya yang lain adalah biaya pendidikan secara sosial. Biaya pendidikan secara sosial (*social costs of education*) merupakan biaya oportunitas yang harus ditanggung oleh masyarakat seluruhnya sebagai akibat dari adanya kebutuhan masyarakat

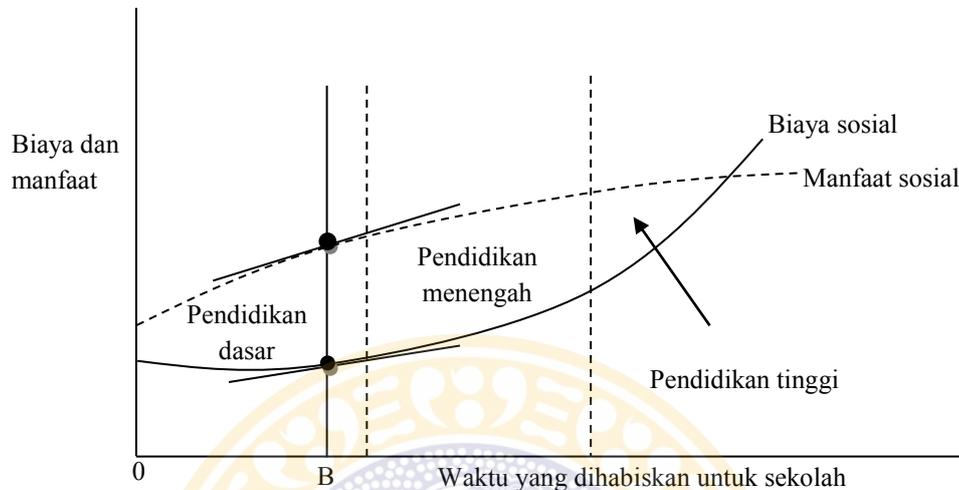
untuk membiayai perluasan pendidikan yang lebih tinggi dan mahal dengan dana yang mungkin akan menjadi lebih produktif apabila digunakan pada sektor-sektor ekonomi yang lain. Jika dibandingkan biaya individu dengan biaya sosial maka manfaat dari pendidikan bagi masyarakat secara keseluruhan (biaya sosial), jauh lebih kecil dibandingkan manfaat individu (biaya individu) (Todaro dan Smith, 2006:456-457).



**Gambar 2.2**  
**Biaya Dan Manfaat Individual**

Peningkatan modal manusia akan memacu tingkat permintaan atas pendidikan yang lebih tinggi, tetapi, penciptaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi akan mengakibatkan lonjakan biaya sosial yang ditanggung oleh masyarakat. Masyarakat juga harus menanggung biaya sosial yang berupa semakin memburuknya alokasi sumber daya yang pada akhirnya akan menyusutkan persediaan dana dan kesempatan untuk menciptakan kesempatan kerja langsung atau untuk menjalankan program pembangunan

lainnya (Todaro dan Smith 2006:458). Berikut gambar kurva biaya dan manfaat sosial pendidikan:



Sumber: Todaro (2006:459)

**Gambar 2.3**  
**Manfaat dan Biaya Sosial**

**Gambar 2.3** menunjukkan bahwa kurva manfaat sosial (*social benefit*) pada awalnya meningkat dengan naiknya tingkat pendidikan, hal ini mencerminkan terjadinya perbaikan tingkat produktivitas dari mereka yang mempunyai pendidikan dasar dan kemudian kurva manfaat sosial laju meningkat lebih lambat dan mulai mendatar. Sedangkan kurva biaya sosial (*social cost*) menunjukkan tingkat pertumbuhan yang rendah pada awal tahun pendidikan dasar dan kemudian tumbuh semakin cepat untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Strategi optimal berdasarkan sudut pandang sosial adalah menitikberatkan tersedianya kesempatan pendidikan minimal selama B tahun, karena setelah itu biaya sosial *marginal* akan melampaui manfaat sosial *marginal* sehingga hanya akan memberikan tingkat manfaat sosial bersih yang negatif.

### **2.1.3. Teori Pertumbuhan Ekonomi**

#### **2.1.3.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Adam Smith**

Menurut ekonom Klasik, Smith, output dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk (Kuncoro, 2010:40). Unsur pokok dari sistem produksi suatu negara ada tiga :

1. Sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat dimana jumlah sumber daya alam yang tersedia mempunyai batas maksimum bagi pertumbuhan suatu perekonomian.
2. Sumber daya insani (jumlah penduduk) merupakan peran pasif dalam proses pertumbuhan output, maksudnya jumlah penduduk akan menyesuaikan dengan kebutuhan akan tenaga kerja.
3. Stok modal merupakan unsur produksi yang sangat menentukan tingkat pertumbuhan output.

Teori yang dikemukakan oleh Smith juga menjelaskan bahwa pada mulanya penambahan tenaga kerja akan menyebabkan kenaikan pendapatan perkapita, namun jumlah penduduk yang terus bertambah akan timbul hukum hasil lebih yang semakin berkurang atau produksi marginal akan mengalami penurunan dan membawa pada keadaan output sama dengan produksi marginal. Keadaan ini mengakibatkan pendapatan perkapita mencapai nilai yang maksimal. Jumlah penduduk pada titik tertinggi dinamakan penduduk optimal. Jumlah penduduk yang terus meningkat dan melebihi titik optimal maka pertumbuhan penduduk akan menyebabkan penurunan output (Kuncoro, 2010:43).

Smith dalam Kuncoro (2010:46) membagi tahapan peningkatan output menjadi 5 tahap yang berurutan, yaitu dimulai dari masa perburuan, masa beternak, masa bercocok tanam, perdagangan, dan yang terakhir adalah tahap perindustrian. Menurut teori yang dikemukakan Smith, masyarakat akan bergerak dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang kapitalis. Smith memandang pekerja sebagai salah satu *input* (masukan) bagi proses produksi Kuncoro (2010:48). Pembagian kerja merupakan titik sentral pembahasan dalam teori yang dikemukakan Smith. Upaya meningkatkan produktivitas tenaga kerja dilakukan spesialisasi. Menurut Smith dalam Kuncoro (2004:49), spesialisasi yang dilakukan oleh tiap-tiap pelaku ekonomi tidak lepas dari faktor-faktor pendorong yaitu: (1) peningkatan ketrampilan pekerja, dan (2) penemuan mesin-mesin yang menghemat tenaga. Spesialisasi akan terjadi jika tahap pembangunan ekonomi telah menuju ke sistem perekonomian modern yang kapitalistik. Meningkatnya kompleksitas aktivitas ekonomi dan kebutuhan hidup di masyarakat, mengharuskan masyarakat untuk tidak lagi melakukan semua pekerjaan secara sendiri, namun lebih ditekankan pada spesialisasi untuk menggeluti bidang tertentu.

#### **2.1.3.2. Teori Pertumbuhan Harrod Domar**

Teori pertumbuhan Harrod-Domar menekankan pentingnya berinvestasi untuk menggantikan atau menambah barang-barang modal yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan Harrod-Domar menjelaskan bahwa setiap tambahan neto terhadap stok modal dalam bentuk

investasi baru akan menghasilkan kenaikan arus output nasional atau GDP (Todaro dan Smith, 2006: 128).

Harrod-Domar menggunakan tiga komponen yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Todaro dan Smith 2006:128), yaitu rasio modal-output atau *capital-output ratio* ( $k$ ); rasio tabungan nasional atau *national saving ratio* ( $s$ ) yaitu bagian dari output nasional yang selalu ditabung; dan jumlah investasi baru yang ditentukan oleh jumlah tabungan total ( $S$ ). Tabungan ( $S$ ) adalah bagian dalam jumlah tertentu, atau  $s$ , dari pendapatan nasional ( $Y$ ). Hubungan tersebut ditulis dalam persamaan sederhana sebagai berikut:

$$S = sY \quad (2.1)$$

Investasi didefinisikan sebagai perubahan stok modal ( $K$ ), yang disebut dengan  $\Delta K$ . Maka:

$$I = \Delta K \quad (2.2)$$

Karena jumlah stok modal  $K$  berhubungan langsung dengan output  $Y$ , maka:

$$\frac{K}{Y} = k \quad (2.3)$$

atau

$$\frac{\Delta K}{\Delta Y} = k \quad (2.4)$$

sehingga

$$\Delta K = k\Delta Y \quad (2.5)$$

Jumlah keseluruhan dari tabungan nasional ( $S$ ) harus sama dengan jumlah investasi ( $I$ ), maka persamaan tersebut ditulis sebagai berikut:

$$S = I \quad (2.6)$$

Dari persamaan (2.2) dan (2.5) dapat diketahui bahwa nilai investasi sama dengan perubahan stok modal dan juga sama dengan rasio modal-output dikalikan dengan perubahan output, sehingga:

$$I = \Delta K = k\Delta Y \quad (2.7)$$

Identitas tabungan yang merupakan persamaan modal pada persamaan (2.6) adalah:

$$S = sY = k\Delta Y = \Delta K = I \quad (2.8)$$

Persamaan 2.8. menunjukkan bahwa tabungan sama dengan perubahan kapital dan sama dengan investasi bisa diringkas menjadi:

$$sY = k\Delta Y \quad (2.9)$$

selanjutnya apabila kedua sisi persamaan (2.9) mula-mula dibagi dengan Y dan kemudian dengan k, maka diperoleh:

$$\frac{s}{k} = \frac{\Delta Y}{Y} \quad (2.10)$$

Persamaan (2.10) menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan output ( $\Delta Y/Y$ ) ditentukan bersama-sama oleh rasio tabungan nasional ( $s$ ) dan rasio modal-output ( $k$ ). Secara spesifik, tingkat pertumbuhan output berbanding lurus dengan rasio tabungan, namun berbanding terbalik dengan rasio modal-output ( $k$ ). Semakin besar rasio tabungan nasional membuat semakin tinggi tingkat pertumbuhan output. Semakin besar rasio modal-output membuat semakin rendah tingkat pertumbuhan output, karena semakin membutuhkan banyak modal untuk menghasilkan satu unit output.

### 2.1.3.3. Teori Pertumbuhan Solow

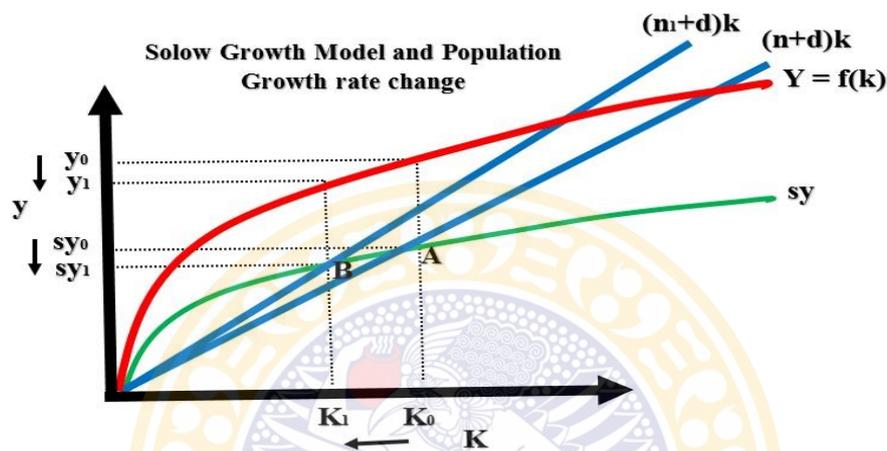
Model pertumbuhan neo-klasik Solow (*Solow neoclassical growth model*) merupakan pilar yang sangat memberi kontribusi terhadap teori

pertumbuhan neo klasik sehingga pengagasnya, Robert Solow, dianugerahi hadiah Nobel bidang ekonomi. Model Solow merupakan pengembangan dari formulasi Harrod-Domar dengan menambahkan faktor kedua, yakni tenaga kerja, serta memperkenalkan variabel independen ketiga, yakni teknologi, ke dalam persamaan pertumbuhan (*growth equation*).

Model pertumbuhan Solow dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian, serta bagaimana pengaruhnya terhadap output barang dan jasa suatu negara secara keseluruhan (Mankiw, 2006:84). Model Solow menjelaskan bahwa peningkatan output dalam jangka panjang ditentukan secara eksogen, atau dengan kata lain ditentukan di luar model. Model Solow memprediksi bahwa pada akhirnya akan terjadi konvergensi dalam perekonomian menuju kondisi pertumbuhan *steady-state* yang bergantung hanya pada perkembangan teknologi dan pertumbuhan tenaga kerja. Kondisi *steady-state* menunjukkan equilibrium perekonomian jangka panjang (Mankiw, 2006:86).

Asumsi utama yang digunakan dalam model Solow adalah bahwa modal mengalami *diminishing returns*. Persediaan tenaga kerja dianggap tetap, dampak akumulasi modal terhadap penambahan output akan selalu lebih sedikit dari penambahan sebelumnya, mencerminkan produk marjinal modal (*marginal product of capital*) yang kian menurun. Diasumsikan bahwa tidak ada perkembangan teknologi atau pertumbuhan tenaga kerja, maka *diminishing return* pada modal mengindikasikan bahwa pada satu titik, penambahan jumlah modal

(melalui tabungan dan investasi) hanya cukup untuk menutupi jumlah modal yang susut karena depresiasi. Pada titik *steady state* perekonomian akan berhenti tumbuh, karena diasumsikan bahwa tidak ada perkembangan teknologi atau pertumbuhan tenaga kerja (Mankiw, 2006:88).



Sumber: Dornbusch, Fischer, dan Startz (2008:105)

**Gambar 2.4.**  
**Kenaikan Tingkat Pertumbuhan Penduduk Menggerser**  
**Steady State Dalam Pertumbuhan Neoklasik**

**Gambar 2.4** menjelaskan secara grafis proses perubahan output apabila terdapat perubahan jumlah penduduk. **Gambar 2.4** menjelaskan bahwa titik A adalah titik keseimbangan awal steady state ( $y_0, k_0$ ), kemudian perubahan jumlah penduduk mengakibatkan kurva  $(n+d)k$  berotasi ke kiri atas. Kenaikan jumlah penduduk menurunkan tingkat *steady state* dari modal per kapita  $k$  dan output per kapita  $y$  ( $y_1, k_1$ ).

#### 2.1.3.4. Teori Pertumbuhan Endogen

Para ahli teori pertumbuhan seperti Romer (1986) dan Lucas (1988) menjelaskan mengenai *new growth theory* atau yang lebih dikenal dengan

*endogenous growth theory* yang muncul karena tidak puas dengan model neo-klasik yang tidak cukup untuk menjelaskan pertumbuhan jangka panjang (*long-run growth*). Pada model pertumbuhan neo-klasik, perubahan teknologi diasumsikan eksogen, dimana pertumbuhan neo-klasik tanpa perubahan teknologi diprediksi bahwa perekonomian akhirnya akan konvergen ke keadaan stabil (*steady state*) dan *diminishing returns to capital* (Barro, 2004:61).

Teori pertumbuhan baru mengasumsikan bahwa perubahan teknologi yang terjadi diperlakukan sebagai variabel yang bersifat endogen. Kemajuan teknologi tersebut salah satunya didukung oleh adanya sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga mereka dapat melakukan inovasi teknologi yang dapat memberikan manfaat besar terhadap pembangunan sehingga pertumbuhan ekonomi dapat terus berlanjut akibat perubahan teknologi. Hal ini seiring dengan perkembangan dunia yang ditandai oleh perkembangan teknologi modern yang digunakan dalam proses produksi.

Pertumbuhan endogen oleh Romer (1986) menjelaskan model pertumbuhan dengan *aggregate increasing return* dimana ekulibrium suatu model pertumbuhan endogen dengan perubahan teknologi serta agen yang *forward-looking* dan *profit-maximizing* dapat mendorong *long run growth* melalui akumulasi pengetahuan. Romer (1990) juga mengembangkan model selanjutnya mengenai implikasi dari pembangunan modal manusia pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang dimana diasumsikan teknologi sebagai *non-rival* dan *partially excludable good* atau dengan kata lain adanya eksternalitas dan efek *spill-over* (limpahan) yang akan menuju pada model *endogenous growth*. Pertumbuhan

merupakan suatu fungsi meningkatnya kekuatan tenaga kerja pada *research and development* (R&D) dan akumulasi pengetahuan.

Model pertumbuhan ekonomi endogen juga dijelaskan oleh Lucas (1988) bahwa sumber daya manusia dapat diakumulasikan dalam fungsi produksi melalui investasi, sehingga mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Dalam model yang digunakan oleh Lucas (1988), dimana skala hasil konstan pada modal fisik (K) dan modal manusia (H) (Barro, 2004:240). Menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas:

$$Y = AK^\alpha H^{1-\alpha} \dots\dots\dots(2.11)$$

dimana  $0 \leq \alpha \leq 1$ ,  $H$  adalah modal manusia yang merupakan jumlah tenaga kerja ( $L$ ) yang dikalikan dengan sejumlah tenaga kerja tertentu ( $h$ ). Asumsi di sini adalah bahwa jumlah pekerja ( $L$ ), dan kualitas tenaga kerja ( $h$ ) adalah substitusi sempurna dalam produksi, dalam arti bahwa hanya kombinasi  $L$  dan  $h$  dalam produksi *output*. Spesifikasi ini mempunyai arti bahwa jumlah tenaga kerja ( $L$ ) yang tidak berubah, tidak akan menjadi sumber dari *diminishing returns*. Diasumsikan bahwa total tenaga kerja ( $L$ ) adalah tetap dan modal manusia ( $H$ ) berkembang karena perbaikan rata-rata kualitas  $h$ . Diasumsikan bahwa  $A$  adalah konstan dimana tidak terjadi kemajuan teknologi.

Investasi pada modal fisik atau modal manusia di asumsikan bahwa stok modal fisik dan modal manusia terdepresiasi pada tingkat yang sama sebesar  $\delta$ . Depresiasi pada modal manusia yaitu penurunan kemampuan dan kematian (Barro, 2004:240-242). Perubahan di kedua stok modal dapat ditulis:

$$\dots\dots\dots(2.12)$$

$$\dot{K} = I_K - \delta K \quad \dot{H} = I_H - \delta H$$

Dimana  $I_K$  dan  $I_H$  adalah *gross investment* di modal fisik dan modal manusia, sehingga *net marginal product of physical capital* adalah:

$$A\alpha \cdot (K/H)^{-(1-\alpha)} - \delta \dots\dots\dots(2.13)$$

Selanjutnya *net marginal product of physical capital* sama dengan *net marginal product of human capital*:

$$A\alpha \cdot (K/H)^{-(1-\alpha)} - \delta = A \cdot (1-\alpha) \cdot (K/H)^\alpha - \delta \dots\dots\dots(2.14)$$

Maka rasio stok modal fisik terhadap modal manusia dapat ditulis:

$$K/H = \alpha/(1-\alpha) \dots\dots\dots(2.15)$$

Dengan mensubstitusikan persamaan (2.15) ke dalam fungsi produksi dari persamaan (2.1) maka dapat ditulis:

$$Y = AK \left( \frac{1-\alpha}{\alpha} \right)^{(1-\alpha)} \dots\dots\dots(2.16)$$

Jadi, besarnya output fungsi produksi dalam model AK ditentukan oleh kontribusi modal manusia  $(1-\alpha)$ , apabila semakin besar kontribusi modal manusia  $(1-\alpha)$  atau semakin kecil kontribusi modal fisik  $(\alpha)$  dalam fungsi produksi maka semakin tinggi output yang dihasilkan. Model tersebut menunjukkan sumber daya manusia (modal manusia) dapat diakumulasikan dalam fungsi produksi melalui investasi, sehingga mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan endogen).

#### 2.1.4. Teori Lingkaran Perangkap Kemiskinan

Negara berkembang pada umumnya terjatuh dalam “*lingkaran setan kemiskinan*”. Ragnar Nurkse adalah salah satu peneliti masalah pembentukan modal di negara berkembang, dalam bukunya yang berjudul *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries* (1953) untuk pertama kalinya nurkse memperkenalkan konsep lingkaran kemiskinan. Konsep tersebut merupakan

landasan untuk menjelaskan tentang perlunya strategi pembangunan yang seimbang di negara sedang berkembang.

Arsyad (2010:111), Lingkaran kemiskinan didefinisikan sebagai suatu rangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi satu sama lain sehingga menimbulkan suatu kondisi di mana sebuah negara akan tetap miskin dan mengalami kesulitan untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Menurut Nurkse, kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh tidak adanya pembangunan pada masa lalu, tetapi kemiskinan juga merupakan faktor penghambat pembangunan dimasa yang akan datang. Salah satu faktor yang diidentifikasi sebagai penyebab timbulnya kemiskinan adalah adanya hambatan yang sangat kuat dalam proses pembentukan modal.

Ada 3 bentuk lingkaran perangkap kemiskinan yaitu (Sukirno, 2010:113-115):

1. Penawaran dan permintaan modal

Penawaran modal, tingkat pendapatan masyarakat yang rendah, diakibatkan oleh tingkat produktivitas yang rendah, menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung juga rendah. Ini akan menyebabkan pembentukan modal menjadi rendah, dan suatu Negara akan mengalami kekurangan modal, sehingga tingkat produktivitas akan tetap rendah. Permintaan modal, di negara-negara miskin perangsang untuk melakukan penanaman modal rendah karena luas pasar untuk berbagai jenis barang terbatas, dan hal ini disebabkan oleh produktivitas yang

rendah yang diwujudkan oleh pembentukan modal yang terbatas dimasa lalu karena kurang perangsang untuk menanam modal.

## 2. Analisis Nurkse

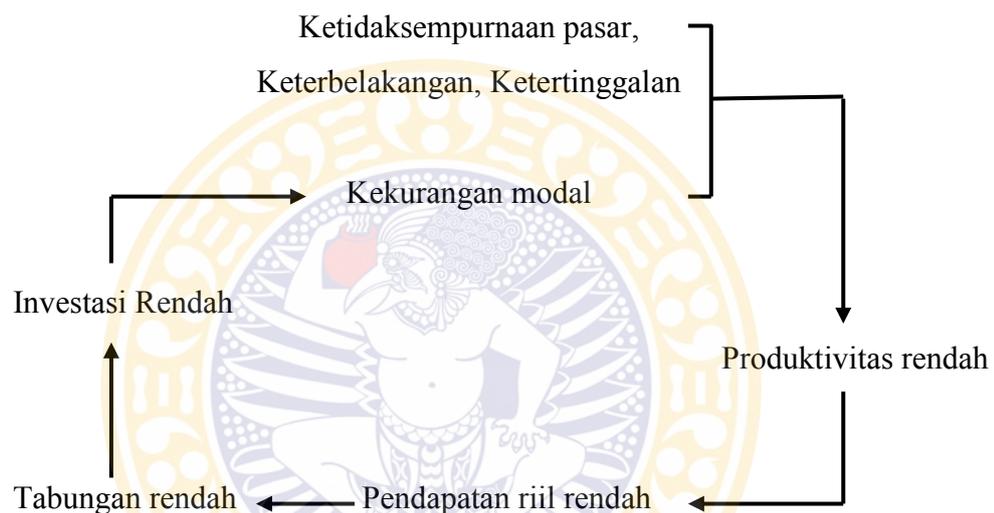
Nurkse menyatakan bahwa peningkatan pembentukan modal bukan saja dibatasi oleh lingkaran perangkap kemiskinan seperti yang dijelaskan di atas, tapi juga oleh adanya *International Demonstration Effect*. *International Demonstration Effect* maksudnya adalah kecenderungan untuk mencontoh corak konsumsi dikalangan masyarakat yang lebih maju.

## 3. Meier dan Baldwin

Menurut Meier dan Baldwin lingkaran perangkap kemiskinan timbul dari hubungan saling mempengaruhi antara keadaan masyarakat yang masih terbelakang dan tradisional dengan kekayaan alam yang belum dikembangkan. Kekayaan alam yang dimiliki dapat dikembangkan jika ada tenaga kerja yang punya keahlian untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan ekonomi. Hal tersebut tidak terwujud dinegara berkembang karena tingkat pendidikan yang masih rendah, tenaga ahli yang dibutuhkan juga terbatas, dan mobilitas sumberdaya juga terbatas. Pada kenyataannya semakin rendah keadaan sosial dan ekonomi suatu negara, semakin terbatas jumlah sumberdaya dan kekayaan alam yang dapat dikembangkan, maka tingkat pembangunan akan rendah pula. Kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian penduduk juga terbatas.

Ketiga penyebab kemiskinan bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan. Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya

modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitasnya mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya (lihat **Gambar 2.5**). Logika berpikir yang dikemukakan oleh Ragnar Nurkse, ditahun 1953, yang mengatakan: “*a poor country is poor because it is poor* (negara miskin itu miskin karena dia miskin).”(Kuncoro, 2010:69)



**Gambar 2.5.**  
**Lingkaran Setan Kemiskinan Versi Nurkse**  
Sumber: Kuncoro, (2010: 70).

### 2.1.5. Teori Efisiensi Upah

Teori upah efisiensi (*efficiency-wage*) menyatakan upah yang tinggi membuat pekerja lebih produktif. Jadi, meskipun pengurangan upah akan menurunkan tagihan upah perusahaan, itu juga akan menurunkan produktivitas pekerja dan laba perusahaan. Teori upah-efisiensi yang pertama menyatakan bahwa upah yang tinggi membuat para pekerja lebih produktif. Pengaruh upah terhadap efisiensi pekerja dapat menjelaskan kegagalan perusahaan untuk memangkas upah meskipun terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja. Meskipun

akan mengurangi tagihan upah perusahaan, maka pengurangan upah akan memperendah produktivitas pekerja dan laba perusahaan. Teori upah-efisiensi yang kedua, menyatakan bahwa upah yang tinggi menurunkan perputaran tenaga kerja. Dengan membayar upah yang tinggi, perusahaan mengurangi frekuensi pekerja yang keluar dari pekerjaan, sekaligus mengurangi waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menarik dan melatih pekerja baru.

Teori upah-efisiensi yang ketiga menyatakan bahwa kualitas rata-rata tenaga kerja perusahaan bergantung pada upah yang dibayar kepada karyawannya. Jika perusahaan mengurangi upahnya, maka pekerja terbaik bisa mengambil pekerjaan di tempat lain, meninggalkan perusahaan dengan pekerja yang tidak terdidik yang memiliki lebih sedikit alternatif. Dan teori upah-efisiensi yang keempat menyatakan bahwa upah yang tinggi meningkatkan upaya pekerja. Teori ini menegaskan bahwa perusahaan tidak dapat memantau dengan sempurna upaya para pekerja, dan para pekerja harus memutuskan sendiri sejauh mana mereka akan bekerja keras. Semakin tinggi upah, semakin besar kerugian bagi pekerja bila mereka sampai dipecat. Dengan membayar upah yang lebih tinggi, perusahaan memotivasi lebih banyak pekerja agar tidak bermalas-malasan dan dengan demikian meningkatkan produktivitas mereka. Meskipun keempat teori upah-efisiensi ini secara rinci berbeda, namun teori-teori tersebut menyuarakan topik yang sama: karena perusahaan beroperasi lebih efisien jika membayar pekerjanya dengan upah yang tinggi, maka perusahaan dapat menganggap bahwa mempertahankan upah di atas tingkat yang menyeimbangkan penawaran dan permintaan adalah menguntungkan. (Mankiw, 2006:124).

Pandangan yang lainnya (bersebrangan) dengan teori neoklasik yakni *efficiency wage theory* (teori upah efisiensi). Teori upah efisiensi ini berfokus pada upah sebagai tujuan yang memotivasi buruh. Jumlah usaha yang dibuat buruh dalam pekerjaannya adalah berhubungan terhadap seberapa baik pekerjaan itu membayar relatif terhadap alternatif pekerjaan lainnya. Perusahaan akan bersedia membayar upah di atas upah keseimbangan pasar untuk memastikan bahwa buruh bekerja keras agar tidak kehilangan pekerjaannya yang baik itu. Teori upah efisiensi ini juga menyebutkan dengan penetapan upah minimum memungkinkan tenaga kerja meningkatkan nutrisinya sehingga dalam jangka panjang dapat meningkatkan produktivitasnya. Peningkatan upah memungkinkan buruh menyekolahkan anaknya dan memberi nutrisi yang lebih baik bagi anak-anaknya. Jangka panjang akan memberi dampak yang besar terhadap peningkatan produktivitas. Upah yang dibayarkan menurut teori ini jauh di atas upah keseimbangan, hal tersebut selain akan meningkatkan produktivitas juga akan menimbulkan loyalitas pekerja, membuat lebih banyak pekerja yang berkualitas

#### **2.1.6. Konsep *Human Development Index***

Asumsi dasar teori *human capital* adalah seseorang dapat meningkatkan *income* melalui peningkatan pendidikan. Setiap tambahan satu tahun sekolah dapat meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat penghasilan seseorang. Disamping penundaan menerima penghasilan tersebut, orang yang melanjutkan sekolah harus membayar biaya secara langsung.

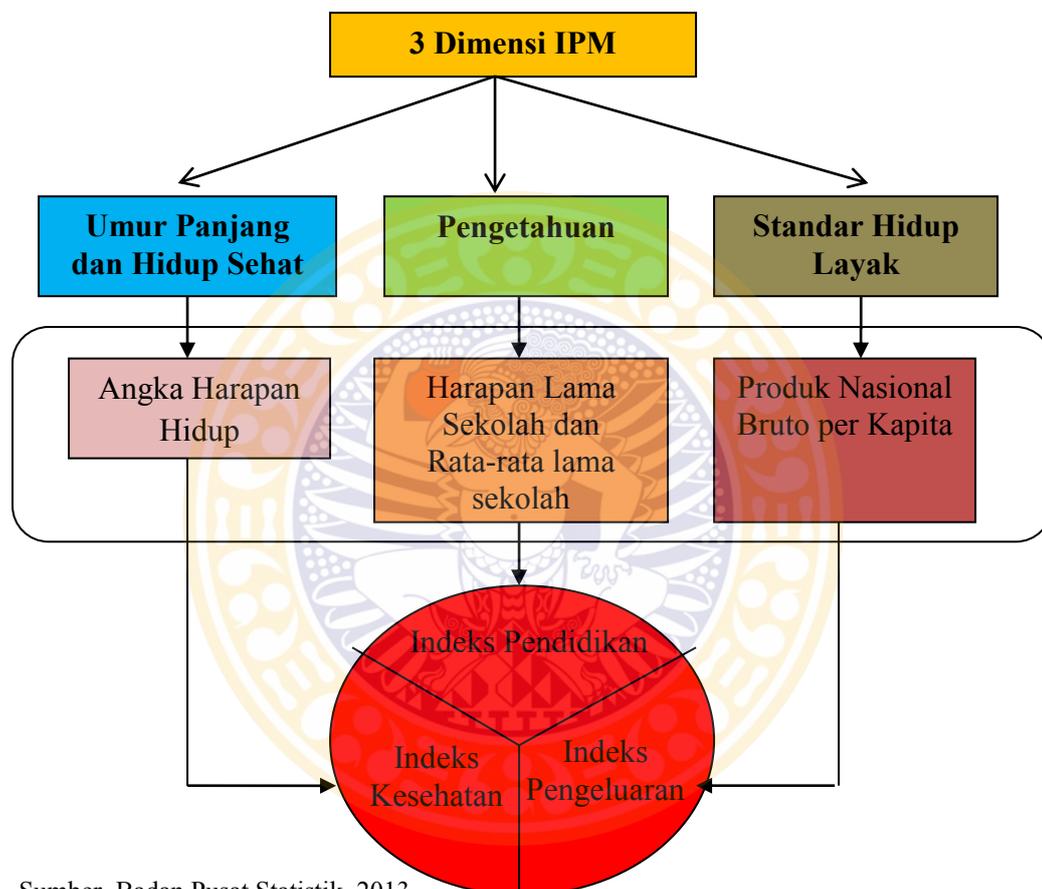
*Human Development Index* (HDI) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga hal

mendasar pembangunan manusia, yaitu: lama hidup, pendidikan, dan standar hidup. Nilai indeks HDI berkisar antara 0 -100. HDI mengukur pencapaian keseluruhan dari suatu daerah/negara dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu lamanya hidup, pengetahuan dan suatu standar hidup yang layak. Ketiganya diukur dengan angka harapan hidup, pencapaian pendidikan, dan pengeluaran per kapita jika IPM hanya dilihat dari pengeluaran per kapita saja, berarti hanya melihat kemajuan status ekonomi suatu daerah/negara berdasarkan pendapatan per tahun sedangkan apabila melihat pada sisi sosial (pendidikan dan kesehatan), maka akan dapat dilihat dimensi yang jauh lebih beragam terkait dengan kualitas hidup masyarakat. Secara tidak langsung, IPM selalu berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat (Yunitasari, 2007). Dengan kata lain semakin tinggi/baik setiap komponen yang menyusun IPM juga berpengaruh terhadap kesejahteraan dan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Konsep *Investment in Human Capital* menganggap bahwa manusia merupakan suatu bentuk modal yang memiliki kesamaan bentuk-bentuk kapital lainnya, seperti mesin, teknologi, tanah, uang, dan material. Manusia sebagai *human capital* tercermin dalam bentuk pengetahuan, gagasan (ide), kreativitas, keterampilan, dan produktivitas kerja. Mesin, teknologi, tanah, uang, dan material hanya diperlakukan sebagai *tools*, *human capital* yang bisa menginvestasikan dirinya sendiri melalui berbagai bentuk investasi sumberdaya manusia, diantaranya pendidikan formal, pendidikan informal (Fattah, 2004).

Berdasarkan **Gambar 2.6** halaman 36 IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Umur panjang dan hidup sehat diukur dengan indikator angka harapan hidup, pengetahuan diukur dengan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, sedangkan standar hidup layak diukur dengan indikator pengeluaran per kapita.



Sumber, Badan Pusat Statistik, 2013

**Gambar 2.6.**  
**Komponen Pembentukan Indeks Pembangunan Manusia**

**Gambar 2.6** merupakan pembentukan IPM dengan metode baru. Dua alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM (BPS, 2015). Pertama, angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan karena secara utuh tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan sehingga diganti dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Angka

melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik. Selain itu, PDB per kapita diganti dengan PNB per kapita karena PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat suatu wilayah. Kedua, penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah disuatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

### **2.1.7. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan *Human Development Index***

Menurut Arsyad (2010:120) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto/Pendapatan Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting guna menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu negara. "Pertumbuhan" (*growth*) tidak identik dengan "pembangunan" (*development*). Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu syarat dari banyak syarat yang diperlukan dalam proses pembangunan.

Kuznets dalam Arsyad (2010:125) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang pada kemampuan suatu negara dalam menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya; kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan serta ideologis yang diperlukannya. Kuznets dalam Arsyad (2010:128) menyatakan pengertian pertumbuhan ekonomi dapat dibagi dalam

empat kriteria. (1) adanya peningkatan dalam permintaan konsumen sejalan dengan peningkatan pendapatan. (2) adanya peningkatan sumber daya manusia dan fisik yang tinggi, melebihi pertumbuhan tenaga kerja. (3) adanya peningkatan kapasitas teknologi karena adanya inovasi-inovasi baru. (4) keterbukaan wilayah terhadap perdagangan internasional dan aliran modal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Menurut Todaro (Todaro dan Smith, 2006:92) terdapat tiga komponen dalam pertumbuhan ekonomi. (1) akumulasi modal. (2) pertumbuhan penduduk. (3) kemajuan teknologi. Proses pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan ekonomi. Jumlah penduduk terus-menerus bertambah demikian juga kebutuhan ekonomi, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. Hal ini hanya bisa diperoleh melalui peningkatan output agregat (barang dan jasa) atau Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahun, dengan demikian dalam pengertian ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan PDB yang berarti juga penambahan pendapatan nasional.

Pertumbuhan ekonomi sekarang dipandang sebagai variabel yang memiliki peranan menggerakkan dan mendorong pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia memiliki keterkaitan dan saling berkontribusi satu sama lain (Anggraini, 2012). UNDP (2011) mengungkapkan bahwa kualitas pembangunan manusia dapat mengalami peningkatan apabila didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan diimbangi dengan pemerataan pendapatan sehingga pertumbuhan ekonomi akan sangat efektif

untuk memperbaiki pembangunan manusia. Kontribusi pertumbuhan ekonomi untuk pembangunan manusia dengan meningkatkan pendapatan pemerintah yang kemudian dapat diinvestasikan untuk pembangunan manusia (Anggraini, 2012).

#### **2.1.8. Hubungan Kemiskinan dengan *Human Development Index***

Menurut World Bank (2006), kemiskinan didefinisikan sebagai hilangnya kesejahteraan masyarakat, sedangkan inti permasalahan pada kemiskinan adalah batasan-batasan tentang kesejahteraan itu sendiri. Jika definisi kemiskinan dihubungkan dengan tingkat kesejahteraan, kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kesejahteraan atau kekurangan akses terhadap sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kekurangan akses disini diartikan sebagai kurangnya pendapatan seseorang.

Kemiskinan dapat diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan bersifat multidimensional yang artinya kebutuhan manusia yang bermacam-macam sehingga kemiskinan memiliki berbagai berbagai macam aspek. Pada umumnya, setiap negara termasuk Indonesia memiliki definisi tersendiri seseorang atau suatu masyarakat yang dikategorikan miskin. Hal ini dikarenakan suatukondisi yang disebut miskin tersebut bersifat relatif untuk setiap negara misalnya kondisi perekonomian, standar kesejahteraan, dan kondisi sosial.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) (2010) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak

dasar terdiri dari hak-hak yang dipahami masyarakat miskin sebagai hak mereka untuk dapat menikmati kehidupan yang bermartabat dan hak yang diakui dalam peraturan perundang-undangan.

Kemiskinan menjadi masalah dalam pembangunan yang dapat mempengaruhi *Human Development Index*. Kemiskinan juga dapat menjadikan efek yang cukup serius bagi pembangunan manusia karena masalah kemiskinan merupakan sebuah masalah yang kompleks yang sebenarnya bermula dari kemampuan daya beli masyarakat yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokok sehingga kebutuhan yang lain seperti pendidikan dan kesehatanpun terabaikan (Mirza, 2012). Hal tersebut menjadikan *gap* pembangunan manusia diantara keduanya pun menjadi besar dan pada akhirnya target capaian IPM yang ditentukan oleh pemerintah menjadi tidak terealisasi dengan baik.

#### **2.1.9. Hubungan PDRB per Kapita dengan *Human Development Index***

Perekonomian suatu daerah memiliki suatu indikator yang digunakan untuk menilai perekonomian berlangsung dengan baik atau buruk. Indikator dalam menilai perekonomian tersebut harus dapat digunakan untuk mengetahui total pendapatan yang diperoleh semua orang dalam perekonomian. Indikator yang pas dan sesuai dalam melakukan pengukuran tersebut adalah PDRB. PDRB terdapat beberapa hal yang tidak disertakan seperti nilai dari semua kegiatan yang terjadi di luar pasar, kualitas lingkungan dan distribusi pendapatan. Oleh sebab itu, PDRB per kapita merupakan alat yang lebih baik yang dapat memberitahukan standar hidup dari warga negaranya (Momongan, 2012).

Suatu daerah yang memiliki PDRB per kapita yang tinggi umumnya memiliki *standard of living* yang juga tinggi. Perbedaan pendapatan mencerminkan perbedaan kualitas hidup: negara kaya (dicerminkan oleh pendapatan per kapita yang tinggi) memiliki kualitas hidup yang lebih baik (dicerminkan oleh, antara lain, angka harapan hidup, tingkat kesehatan, dan tingkat pendidikan) dibandingkan dengan negara miskin (Oktavia, 2008). Selain itu, kenaikan dalam pendapatan perkapita merupakan pencerminan dari timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat (Purba, 2011).

Pendapatan per kapita juga menggambarkan tingkat kemakmuran (*wealth*), daya beli (*purchasing power parity*), dan kemajuan pembangunan suatu negara (Barro, 2003). Angka pendapatan per kapita didapatkan melalui pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut (Barro, 2003). Semakin besar PDRB per kapita suatu negara, semakin makmur masyarakatnya. Oleh karena itu, PDRB per kapita juga seringkali digunakan untuk membandingkan pertumbuhan ekonomi antarnegara.

Indikator kesejahteraan penduduk suatu daerah yakni PDRB per kapita (Pratiwi dan Sutrisna, 2014). Norton (2002) menyatakan bahwa apabila pertumbuhan PDRB per kapita tinggi berarti terdapat lebih banyak pekerjaan yang lebih baik dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi, Secara ekonomi makro, PDRB per kapita dapat mempengaruhi *human development index*. Peningkatan PDRB per kapita akan meningkatkan standar hidup layak masyarakat sehingga daya beli juga mengalami peningkatan. Peningkatan daya beli berdampak pada peningkatan *human development index*.

### **2.1.10. Hubungan Upah Minimum dengan *Human Development Index***

Masalah tenaga kerja tidak terlepas dari upah minimum regional (UMR). Upah minimum ini merupakan salah satu pertimbangan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya disuatu daerah terutama investor yang ingin mendirikan pabrik atau industri yang banyak menyerap tenaga kerja. Semakin tinggi upah minimum regional suatu daerah menunjukkan semakin tinggi tingkat ekonominya (Bappeda, 2010) dalam Chalid dan Yusuf (2015).

Kebijakan Upah Minimum telah menjadi isu yang penting dalam masalah ketenagakerjaan di beberapa negara baik maju maupun berkembang. Sasaran dari kebijakan upah minimum ini adalah untuk menutupi kebutuhan hidup minimum dari pekerja dan keluarganya. Tujuan dan manfaat Kebijakan upah minimum diterapkan atau dibuat adalah untuk (1) menjamin penghasilan pekerja sehingga tidak lebih rendah dari suatu tingkat tertentu, (2) meningkatkan produktivitas pekerja, (3) mengembangkan dan meningkatkan kualitas perusahaan dengan cara-cara produksi yang lebih efisien (Sumarsono, 2003).

Pemerintah daerah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan memperhatikan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi. Usulan penetapan upah minimum kabupaten/kota dirumuskan oleh dewan pengupahan kabupaten/kota yang merupakan hasil pembahasan dengan Pemerintah, Serikat Pekerja (SP) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) (Fajarwati, 2011). Penetapan UMK disahkan oleh pemerintah daerah karena pemerintah daerah memiliki tugas menjadi perantara antara serikat pekerja dengan

para pengusaha. Kebijakan upah minimum juga mempengaruhi permintaan tenaga kerja wanita.

Peningkatan upah minimum regional akan meningkatkan kebutuhan hidup layak sehingga standar hidup layak juga mengalami peningkatan yang akan berpengaruh terhadap kepada kesejahteraan masyarakat. Jumlah upah minimum haruslah dapat memenuhi kebutuhan hidup buruh secara minimal yaitu kebutuhan untuk sandang, pangan dan keperluan rumah tangga. Akibat peningkatan upah minimum yang diterima, daya beli masyarakat mengalami peningkatan sehingga berdampak positif pada *human development index*.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Mirza (2012) meneliti tentang indeks pembangunan manusia di daerah provinsi Jawa Tengah mulai periode 2006-2009. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Tengah tahun 2006-2009 dan menganalisis seberapa besar pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan perkembangan IPM mengalami peningkatan dengan kategori IPM menengah selama periode tahun 2006-2009 hingga mampu mencapai target IPM yang telah ditetapkan oleh pemerintah sedangkan hasil regresi panel menunjukkan kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM dan Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Kesimpulannya bahwa perkembangan IPM

mengalami peningkatan selama tahun 2006-2009, kemiskinan berpengaruh negatif, pertumbuhan ekonomi dan belanja modal berpengaruh positif. Melalui penelitian ini disarankan agar dalam merencanakan kebijakan pemerintah tidak hanya melihat dari pencapaian target peningkatan pertumbuhan ekonomi saja namun juga target peningkatan pembangunan manusia karena pertumbuhan ekonomi sendiri belum memadai untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada aspek pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat.

Hukom (2015) melakukan penelitian tentang indeks pembangunan manusia periode 2006-2013 di provinsi Kalimantan Tengah. Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Hukom (2015) yaitu mendeskripsikan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2006-2013 dan menganalisis pengaruh tingkat belanja modal, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi data panel. Variabel dependen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sedangkan tingkat belanja modal, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan sebagai variabel independen. Hasil yang diperoleh yaitu belanja modal berpengaruh positif dan signifikan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Tengah, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Tengah, dan tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Tengah.

Muhammad dkk, (2010) meneliti tentang *human development index* di negara Pakistan dengan periode penelitian 1975-2008. Tujuan penelitian

Muhammad dkk, (2010) yaitu menganalisis pengaruh *foreign direct investment* dan perdagangan internasional terhadap *human development index* dengan studi kasus negara Pakistan. *Human development index* sebagai variabel dependen dan rasio FDI terhadap PDB, pertumbuhan ekonomi, bersama dengan ekspor dan impor sebagai variabel independen. Metode yang digunakan adalah OLS (*Ordinary Least Square*). Kesimpulan dari penelitian Muhammad dkk, (2010) yaitu FDI adalah signifikan, namun perdagangan internasional tidak signifikan terhadap *human development index*.

Chalid dan Yusuf (2014) melakukan penelitian dengan topik HDI di provinsi Riau tahun 2006-2011. Metode yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Penelitian Chalid dan Yusuf (2014) bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, upah minimum kabupaten/kota dan laju pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Riau. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, Jakarta, Indonesia, Badan Pusat Statistik Provinsi Riau dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau. Analisis data menggunakan regresi linear berganda. Dari hasil analisis diketahui tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, upah minimum kabupaten/kota dan laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap IPM. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran berpengaruh negatif terhadap IPM, masing-masing dengan koefisien regresi sebesar -0,163 dan -0,084. Upah minimum kabupaten/kota dan laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap IPM, dengan koefisien regresi masing-

masing 0,005 dan 0,953. Variabel yang sangat besar pengaruhnya terhadap IPM adalah laju pertumbuhan ekonomi..

Ananta (2012) melakukan penelitian dengan ujian menguji pengaruh PDRB/kapita, pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan, pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Lampung. Berdasarkan analisis ekonomi dan pembahasan tentang determinan pembangunan manusia Provinsi Lampung dengan estimasi model *Ordinary Least Square* (OLS) dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM), maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) secara parsial variabel PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung, (2) Secara parsial variabel Pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota di Provinsi Lampung. (3) Secara parsial variabel Pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota di Provinsi Lampung. (4) Secara simultan variabel PDRB per kapita, variabel pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan, dan variabel pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan berpengaruh terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

### **2.3. Hipotesis Penelitian dan Model Analisis**

#### **2.3.1. Hipotesis Penelitian**

3. Pertumbuhan ekonomi, Kemiskinan, PDRB perkapita, dan upah minimum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *human development index* di 12 provinsi Indonesia

4. Pertumbuhan ekonomi, Kemiskinan, PDRB perkapita, dan upah minimum secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *human development index* di 12 provinsi Indonesia

### 2.3.2. Model Analisis

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model panel sedangkan alat analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Penggunaan model panel dan metode regresi data panel didasarkan pada gabungan data *cross section* dan *time series*. Persamaan model dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$HDI_{it} = \alpha + \beta_1 EG_{it} + \beta_2 LPOV_{it} + \beta_3 LYPC_{it} + \beta_4 LUMP_{it} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (2.17)$$

dimana:

<i>HDI</i>	= <i>Human Development Index</i>
<i>EG</i>	= Pertumbuhan Ekonomi
<i>POV</i>	= Jumlah Penduduk Miskin
<i>YPC</i>	= PDRB per kapita
<i>UMP</i>	= Upah Minimum
$\alpha$	= <i>intercept</i>
$\beta_{1it}, \beta_{2it}, \beta_{3it}, \beta_{4it}$	= Koefisien variabel bebas (variabel independen)
$\varepsilon_{it}$	= <i>Error term</i>
<i>i</i>	= 12 provinsi di Indonesia
<i>t</i>	= 2011-2014
<i>L</i>	= Logaritma

### 2.4. Kerangka Berpikir

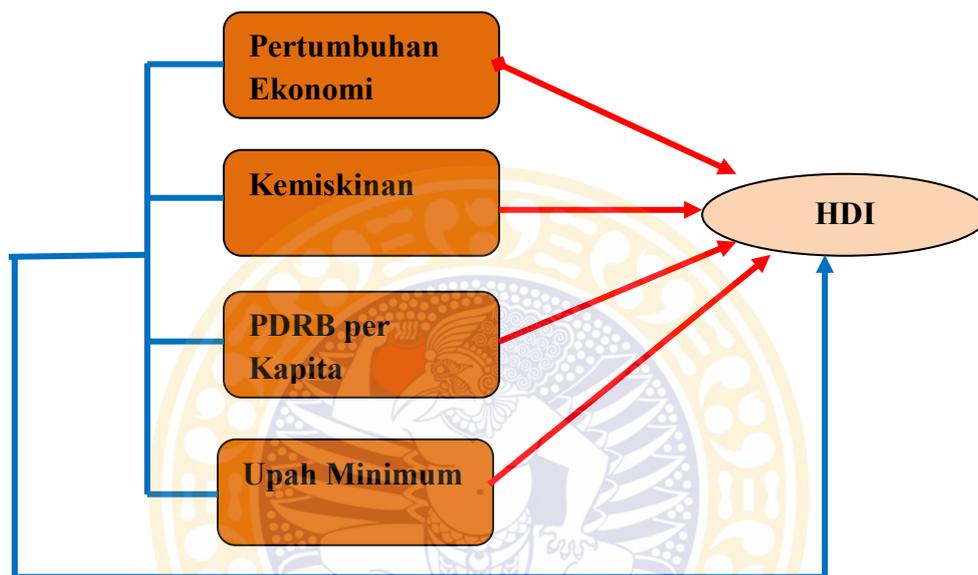
*Human development index* di Indonesia dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Umur

panjang dan hidup sehat dengan indikator angka harapan hidup, pengetahuan diukur dengan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, sedangkan standar hidup layak diukur dengan indikator pengeluaran per kapita.

Penelitian ini menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan PDRB per kapita, serta upah minimum untuk mempengaruhi *human development index* di 12 provinsi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia memiliki hubungan positif. Tingginya pertumbuhan ekonomi dapat mendorong indeks pembangunan manusia (Mirza, 2012). Kemiskinan juga dapat menjadikan efek yang cukup serius bagi pembangunan manusia. Kemiskinan berdampak negatif terhadap HDI. Kemiskinan membuat daya beli masyarakat tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokok sehingga kebutuhan pendidikan dan kesehatan tidak diperhatikan. Hal tersebut menjadikan *gap* pembangunan manusia diantara keduanya pun menjadi besar dan pada akhirnya target capaian *human development index* yang ditentukan oleh pemerintah menjadi tidak terealisasi dengan baik.

Pendapatan per kapita juga merefleksikan kemakmuran (*wealth*), daya beli (*purchasing power parity*), dan kemajuan pembangunan suatu negara (Barro, 2003). Semakin besar PDRB per kapita suatu negara, semakin makmur masyarakatnya. Peningkatan PDRB per kapita akan meningkatkan standar hidup layak masyarakat sehingga daya beli juga mengalami peningkatan. Peningkatan daya beli berdampak pada peningkatan *human development index*. Peningkatan upah minimum regional akan meningkatkan kebutuhan hidup layak sehingga standar hidup layak juga mengalami peningkatan. Akibat peningkatan upah

minimum yang diterima, daya beli masyarakat mengalami peningkatan sehingga berdampak positif pada *human development index*.



Gambar 2.7.  
Kerangka Berpikir

Keterangan:  secara parsial  secara simultan

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan rumusan masalah adalah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengujian hipotesis berdasarkan pada model analisis yang digunakan baik secara sendiri-sendiri (uji t) maupun secara bersama-sama (uji F). Pendekatan kuantitatif digunakan untuk melihat apakah hasil dari model analisis yang digunakan secara statistik (signifikan) atau tidak. Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan metode statistik dengan model regresi data panel. Penulis juga menggunakan *software* Stata 13 untuk melakukan regresi data panel.

#### **3.2. Identifikasi Variabel**

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas (*independent variabel*) dan variabel terikat (*dependent variabel*). Penelitian ini variabel terikat yang digunakan adalah *human development index* di 12 provinsi Indonesia, sedangkan variabel bebas (variabel independen) yang digunakan sebagai bahan observasi yang diduga berpengaruh terhadap variabel terikat, yaitu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, PDRB per kapita, dan upah minimum.

#### **3.3. Definisi Operasional**

Definisi operasional variabel adalah batasan dan penjelasan mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Definisi operasional meliputi :

### 1. *Human Development Index*

Menurut BPS, IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). UNDP membedakan tingkat *human development index* berdasarkan empat klasifikasi yakni: *low* (HDI < 50%), *lower-medium* (HDI antara 50% dan 65,99%), *upper-medium* (HDI antara 66 dan 79,99) dan *high* (HDI 80 ke atas) (Ginting dkk., 2008). Satuan *Human Development Index* berupa index. Perhitungan IPM metode baru didasarkan pada rata-rata geometrik sehingga dapat ditulis sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{(I_{kesehatan}) \times (I_{pendidikan}) \times (I_{pengeluaran})} \times 100 \dots \dots \dots (3.1)$$

Keterangan:

$I_{kesehatan}$  = Indeks kesehatan

$I_{pendidikan}$  = Indeks pendidikan

$I_{pengeluaran}$  = Indeks pengeluaran

### 2. **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan yang terjadi dan sebagai indikator penting bagi daerah untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan (Sirojuzilam dan Kasyful, 2010:79). Menurut Glasson (1977:86 dalam Sirojuzilam dan Kasyful, 2010:82), pertumbuhan regional dapat terjadi sebagai akibat dari penentu-penentu endogen

ataupun eksogen, yaitu faktor-faktor yang terdapat di dalam daerah yang bersangkutan ataupun faktor-faktor di luar daerah, atau kombinasi dari keduanya. Penentu endogen, meliputi distribusi faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, dan modal sedangkan penentu eksogen adalah tingkat permintaan dari daerah lain terhadap komoditi yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Satuan pertumbuhan ekonomi berupa persen. Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung sebagai berikut:

$$EG = \left( \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \right) \times 100\% \dots \dots \dots (3.2)$$

### 3. Kemiskinan

Menurut Usman (2003) kemiskinan adalah kondisi kehilangan sumber-sumber penting kebutuhan dasar yang berupa pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan serta hidupnya serba kekurangan. Kemiskinan yaitu persentase penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan menurut provinsi di Indonesia. Kemiskinan di transformasikan kedalam bentuk logaritma.

### 4. PDRB per Kapita

PDRB perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah dibagi jumlah penduduk. PDRB dalam penelitian ini adalah PDRB atas dasar harga konstan (2000=100). Satuan PDRB perkapita adalah rupiah kemudian di transformasikan ke dalam logaritma natural. Rumus perhitungan PDRB per kapita sebagai berikut:

$$PDRB/KAPITA = \frac{PDRB}{JUMLAH PENDUDUK} \dots\dots\dots(3.3)$$

## 5. Upah Minimum

Pemberian upah kepada tenaga kerja dalam suatu kegiatan produksi pada dasarnya merupakan imbalan/balas jasa dari para produsen kepada tenaga kerja atas prestasinya yang telah disumbangkan dalam kegiatan produksi.

Ricardo dalam arsyad (2010:124) upah dibedakan menjadi dua: pertama, upah menurut kodrat yaitu upah yang cukup untuk pemeliharaan hidup pekerja dengan keluarganya. Kedua, upah menurut harga pasar yaitu upah yang terjadi di pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Upah harga pasar akan berubah di sekitar upah menurut kodrat. Oleh ahli-ahli ekonomi modern, upah kodrat dijadikan batas minimum dari upah kerja.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 7 Tahun 2013 Bab I Pasal 1 menyebutkan bahwa Upah Minimum kabupaten/kota yang disingkat UMK adalah upah minimum yang berlaku untuk keseluruhan kabupaten/kota. Satuan Upah Minimum berupa rupiah. Upah Minimum kemudian di transformasi ke dalam bentuk logaritma.

### 3.4. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Jenis data sekunder yang digunakan terdiri dari dua jenis data yaitu data berkala (*time series*) dan data *cross section*. Data berkala (*time series*) yaitu data yang didasarkan pada periode terjadinya atau dari waktu ke waktu, pada penelitian ini digunakan data berlaku selama 4 tahun mulai tahun 2011-2014. Daerah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 33 provinsi Indonesia.

**Tabel 3.1.**  
**Jenis Data Dan Sumber Data**

Variabel	Jenis Data	Sumber Data	Jumlah Observasi	Periode
HDI	Sekunder	BPS Nasional	12 provinsi	2011-2014
Pertumbuhan Ekonomi	Sekunder	BPS Nasional	12 provinsi	2011-2014
Kemiskinan	Sekunder	BPS Nasional	12 provinsi	2011-2014
PDRB per kapita	Sekunder	BPS Nasional	12 provinsi	2011-2014
Upah Minimum	Sekunder	BPS Nasional	12 provinsi	2011-2014

### 3.5. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data secara langsung diperoleh melalui website BPS nasional.

Data tersebut meliputi :

1. Data *human development index* menurut provinsi Indonesia tahun 2011-2014.
2. Data pertumbuhan ekonomi menurut provinsi Indonesia tahun 2011-2014.
3. Data kemiskinan menurut provinsi Indonesia tahun 2011-2014.
4. Data PDRB per kapita menurut provinsi Indonesia tahun 2011-2014.
5. Data Upah Minimum menurut provinsi Indonesia tahun 2011-2014.

### 3.6. Teknik Analisis

#### 3.6.1. Metode Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda data panel. Data panel atau *pooled data* adalah kombinasi dari data *time series* dan *cross section*. Jumlah observasi akan bertambah secara signifikan tanpa melakukan treatment apapun terhadap data. Dengan mengakomodasi informasi baik yang terkait dengan variabel-variabel *cross section* maupun *time series*, data panel secara substansial mampu menurunkan masalah *omitted variable* atau mengabaikan variabel yang relevan (Gujarati, 2012:637).

Menurut Widarjono (2009:123) bahwa residual dalam model regresi data panel mempunyai mempunyai tiga kemungkinan yakni residual time series, cross section maupun gabungan keduanya. Terdapat beberapa metode yang bisa digunakan untuk mengestimasi model regresi model regresi data panel, yakni sebagai berikut:

1. *Pooled Least Square (PLS)* yakni teknik yang hanya mengkombinasikan data time series dan cross section. Dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data di Jawa Timur (*cross section*) adalah sama dalam berbagai waktu. Namun dengan mencantumkan *dummy* berupa wilayah budaya di Jawa Timur dalam penelitian ini akan mampu melihat perbedaan perilaku individu di Jawa Timur.
2. *Fixed Effect Model (FEM)* yakni teknik yang memperhitungkan kemungkinan bahwa peneliti akan menghadapi masalah *omitted variables* dimana *omitted variables* ini mungkin membaca perubahan pada *intercept time series* atau *cross section*. Teknik *fixed effect* model ini menambahkan variabel *dummy* yang mengizinkan adanya perubahan *intercept*. Variabel *dummy* ini berguna untuk menangkap adanya perbedaan *intercept* antar individu dan antar waktu. Teknik ini juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi (*slope*) tetap antar Kabupaten/ Kota di Jawa Timur dan antar waktu.
3. *Random Effect Model (REM)* yakni teknik dalam mengestimasi data panel yang memperhitungkan perbedaan antar individu dan waktu

yang dicerminkan lewat intersep yang diakomodasi lewat error yang mungkin berkorelasi sepanjang cross section dan time series.

Adapun model data panel untuk masing-masing teknik regresi adalah sebagai berikut (Gujarati, 2012:175):

a. *Pooled Least Square (PLS)*

$$Y_{it} = \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 X_{3it} + \dots + \beta_n X_{nit} + u_{it} \dots \dots \dots (3.4)$$

b. *Fixed Effect Model (FEM)*

$$Y_{it} = \alpha_1 + \alpha_2 D_2 + \dots + \alpha_n D_n + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + u_{it} \dots \dots \dots (3.5)$$

c. *Random Effect Model (REM)*

$$Y_{it} = \beta_1 + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + \varepsilon_{it} + u_{it} \dots \dots \dots (3.6)$$

Keunggulan metode data panel seperti yang telah disebutkan oleh Widarjono (2009:125) adalah :

1. Data panel mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu.
2. Kemampuan mengontrol heterogenitas individu ini, pada gilirannya menjadikan data panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku yang lebih kompleks.
3. Data panel mendasarkan diri pada observasi *cross section* yang berulang-ulang (*time series*), sehingga metode data panel cocok untuk digunakan sebagai *study of dynamic adjustment*.
4. Tingginya jumlah observasi memiliki implikasi pada data yang lebih informatif, lebih variatif, kolinearitas antar variabel yang semakin

berkurang, dan pada peningkatan derajat kebebasan (*degree of freedom*), sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien.

5. Data panel dapat digunakan untuk mempelajari model-model perilaku yang kompleks.
6. Data panel dapat meminimalisir bias yang mungkin ditimbulkan oleh agregasi data individu.

### 3.6.2. Pemilihan Model Estimasi dalam Data Panel

Pemilihan antara metode *Pooled Least Square* (PLS) dan *Fixed Effect Model* (FEM) menggunakan uji chow, sedangkan uji Hausman digunakan untuk memilih antara *Random Effect Model* (REM) atau *Fixed effect Model* (FEM).

Dalam *Fixed effect Model* (FEM), bentuk umum regresi data panel adalah:

$$Y_{it} = \beta_1 + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \dots + \beta_n X_{nit} + u_{it} \dots \dots \dots (3.4)$$

Uji Chow test merupakan uji untuk memilih apakah pendekatan model yang digunakan PLS atau FEM. Pengujian ini disebut chow test karena kemiripannya dengan *chow test* yang digunakan untuk menguji stabilitas dari parameter (*stability test*).

Uji F dapat digunakan untuk memilih teknik dengan model *Pooled Least Square* (PLS) atau *Fixed effect Model* (FEM) dengan rumus sebagai berikut (Gujarati, 2003: 643).

Chow test menggunakan distribusi F dengan rumus sebagai tersebut:

$$F = \frac{(R^2_{ur} - R^2_r) / (m)}{(1 - R^2_{ur}) / (n - k)} \dots \dots \dots (3.7)$$

Dimana :

$$R^2_r = R^2 \text{ model PLS}$$

$$R^2_{ur} = R^2 \text{ model FEM}$$

$m$  = jumlah *restricted variables*

$n$  = jumlah sampel

$k$  = jumlah variabel penjelas

Hipotesis dari *restricted F test* adalah :

$H_0$  = Model *Pooled Least Square (restricted)*

$H_1$  = Model *Fixed Effect (unrestricted)*

Berdasarkan rumus persamaan 3.7, jika kita mendapatkan hasil nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  pada tingkat keyakinan ( $\alpha$ ) tertentu, maka kita menolak hipotesis  $H_0$  yang menyatakan bahwa kita harus memilih teknik *Pooled Least Square* (PLS), sehingga kita menerima hipotesis  $H_1$  yang menyatakan kita harus menggunakan *Fixed effect Model* (FEM) untuk teknik estimasi dalam penelitian ini.

Uji Hausman sendiri digunakan untuk memilih antara metode *Fixed effect* atau *Random effect*. Hipotesis nol dari pada uji Hausman adalah :

$$H_0 = \text{random effect}$$

$$H_1 = \text{fixed effect}$$

Apabila nilai probabilitas uji Hausman  $< \alpha$  (5%) maka  $H_0$  ditolak sehingga model yang digunakan adalah *Random Effect Model* (REM).

### 3.6.3. Pengujian Statistik

Setelah kita mengestimasi data panel menggunakan teknik yang sesuai dengan uji-uji sebelumnya, maka langkah selanjutnya ialah melakukan uji statistik. Uji statistik ini dilakukan untuk mengetahui bermakna atau tidaknya

variabel atau model yang kita gunakan secara parsial maupun keseluruhan. Uji statistik yang dilakukan antara lain:

a. Uji  $R^2$  (*R-square*)

Kegunaan dari  $R^2$  ini adalah untuk menunjukkan apakah variabel independennya dapat menerangkan variabel dependennya dengan baik atau tidak. Nilai  $R^2$  berkisar antara 0 – 1. Suatu model *time series* apabila  $R^2$  mencapai angka 1, maka variabel independennya dapat menerangkan variabel dependennya dengan sempurna. Sebaliknya apabila  $R^2$  mencapai angka 0, berarti variabel independennya tidak dapat atau lemah dalam menerangkan variabel dependennya.

b. Uji  $t$

Fungsi uji  $t$  adalah untuk menentukan signifikansi suatu variabel independent secara individual dalam mempengaruhi variabel dependen. Dalam hal ini diterapkan hipotesis sebagai berikut :

$$H_0 : \beta_l = 0$$

$$H_1 : \beta_l \neq 0$$

Apabila  $t_0$  (  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ), maka hipotesis nol ( $H_0$ ) diterima dan hipotesis alternative ( $H_1$ ) ditolak, artinya model yang digunakan kurang baik. Dengan kata lain variabel independen tidak dapat menerangkan variabel dependennya atau tidak signifikan. Sebaliknya jika  $t_0$  (  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ), maka dapat dikatakan bahwa variabel independen dapat menerangkan variabel dependennya atau signifikan.

c. Uji  $F$ 

Uji  $F$  digunakan untuk menentukan signifikan atau tidaknya suatu variabel independen secara simultan (bersama-sama) dalam mempengaruhi variabel dependennya. Dalam hal ini ditetapkan sebagai berikut:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_k = 0$$

$$H_1 : \text{paling tidak salah satu atau semua dari } \beta_1, \beta_2 \text{ atau } \beta_3 \neq 0$$

Jika hasil perhitungan ternyata,  $F_0$  ( $F$  hitung)  $<$  ( $F$  tabel), maka hipotesis nol ( $H_0$ ) diterima dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) ditolak. Bila terjadi keadaan demikian, dapat dikatakan bahwa variasi dari model regresi tidak berhasil menerangkan variabel independennya. Sebaliknya, jika  $F_0$  ( $F$  hitung)  $>$  ( $F$  tabel) maka dapat dikatakan hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) diterima. Bila terjadi keadaan demikian dikatakan bahwa variasi dari model regresi dapat menerangkan variasi variabel independennya.

## BAB 4

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Gambaran Umum Variabel Penelitian

##### 4.1.1. *Human Development Index*

Konsep *human development index* pertama kali dipublikasikan UNDP melalui *Human Development Report* tahun 1996, yang kemudian berlanjut setiap tahun. *Human Development Index* merupakan ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah yang mempunyai dimensi yang sangat luas, karena memperlihatkan kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup layak (Melliana dan Zain, 2013). UNDP (2001) dalam Syamsudin (2012), paradigma pembangunan manusia terdiri dari tiga komponen utama, yaitu (1) Produktifitas, yang artinya masyarakat harus dapat meningkatkan produktifitas dan berpartisipasi secara penuh untuk memperoleh penghasilan dan pekerjaan, (2) Kestinambungan, yang artinya, akses untuk memperoleh kesempatan harus tidak hanya untuk generasi sekarang tapi juga generasi yang akan datang, dan (3) Pemberdayaan, yang artinya, pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam proses pengambil keputusan melalui lembaga formal dan informal.

**Tabel 4.1** halaman 62 menunjukkan provinsi Papua memiliki *human development index* paling rendah dibandingkan sebelas provinsi lainnya. *Human development index* di provinsi Papua secara rata-rata dari tahun 2011-2014 sebesar 55,89%. Rendahnya nilai *human development index* di Papua karena kurangnya peranan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan masyarakat

terhadap ketiga dibidang yaitu: pendidikan, ekonomi, dan kesehatan pada Provinsi Papua serta ditambah dengan jumlah penduduk miskin masih banyak. Papua memiliki sumber daya alam yang sangat besar sehingga provinsi Papua seharusnya mampu bersaing untuk meningkatkan *human development index* dengan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Solusi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Papua untuk mengejar ketertinggalan HDI dengan provinsi lain yaitu dengan cara (1) mengurangi tingkat kematian ibu melahirkan, bayi, dan serta menjamin kecukupan nutrisi pada penduduk bayi dan balita; (2) penyediaan lapangan kerja yang sesuai dengan karakteristik tenaga kerja dengan cara membangun industri pengolahan berbasis sumber daya lokal; (3) meningkatkan alokasi belanja pendidikan, terutama untuk daerah pegunungan dan daerah sulit akses; (4) meningkatkan tambahan belanja kesehatan untuk daerah pegunungan (BPS, 2013).

**Tabel 4.1.**  
**Perkembangan *Human Development Index* di Provinsi Indonesia dengan Kategori *Lower-Medium* (satuan persen)**

Provinsi	2011	2012	2013	2014	Rata-Rata
Sumatera Selatan	65,12	65,79	66,16	66,75	65,96
Lampung	64,20	64,87	65,73	66,42	65,31
Nusa Tenggara Barat	62,14	62,98	63,76	64,31	63,30
Nusa Tenggara Timur	60,24	60,81	61,68	62,26	61,25
Kalimantan Barat	62,35	63,41	64,30	64,89	63,74
Sulawesi Tengah	64,27	65,00	65,79	66,43	65,37
Gorontalo	63,48	64,16	64,70	65,17	64,38
Sulawesi Barat	60,63	61,01	61,53	62,24	61,35
Maluku	64,75	65,43	66,09	66,74	65,75
Maluku Utara	63,19	63,93	64,78	65,18	64,27
Papua Barat	59,90	60,30	60,91	61,28	60,60
Papua	55,01	55,55	56,25	56,75	55,89

Sumber: BPS,2014

**Tabel 4.1** halaman 62 juga menunjukkan bahwa provinsi Papua Barat memiliki nilai *human development index* terendah kedua di Provinsi Indonesia dengan Kategori *Lower-Medium*. Nilai *human development index* Papua Barat lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi Papua. Secara umum *human development index* provinsi Papua Barat terus mengalami peningkatan setiap tahun. Peningkatan *human development index* provinsi Papua Barat didorong oleh peningkatan angka harapan hidup, harapan lama sekolah, pengeluaran kapita di seluruh kabupaten/kota provinsi Papua Barat (BPS, 2015).

#### 4.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu unsur utama dalam pembangunan ekonomi regional dan mempunyai implikasi kebijakan yang cukup luas, walaupun disadari bahwa proses pembangunan bukan hanya ditentukan oleh faktor ekonomi (Simamora 2008). Menurut Kuznets (1971) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan kemampuan suatu negara di dalam menyediakan barang-barang ekonomi kepada penduduknya, dimana pertumbuhan tersebut disebabkan oleh kemajuan teknologi, kelembagaan, dan kesesuaian ideologis yang dibutuhkan (Arsyad, 2010: 277). Indikator yang digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi regional adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Susanti, 2000: 23). Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi regional dari sisi permintaan dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor, sedangkan dari sisi penawaran dapat meningkatkan sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier.

**Tabel 4.2.**  
**Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Indonesia dengan**  
**Kategori *Lower-Medium* (satuan persen)**

Provinsi	2011	2012	2013	2014	Rata-Rata
Sumatera Selatan	6,36	6,83	5,40	4,68	5,82
Lampung	6,56	6,44	5,78	5,08	5,97
Nusa Tenggara Barat	-3,91	-1,54	5,15	5,06	1,19
Nusa Tenggara Timur	5,67	5,46	5,42	5,04	5,40
Kalimantan Barat	5,50	5,91	6,04	5,02	5,62
Sulawesi Tengah	9,82	9,53	9,55	5,11	8,50
Gorontalo	7,71	7,91	7,68	7,29	7,65
Sulawesi Barat	10,73	9,25	6,94	8,73	8,91
Maluku	6,34	7,16	5,26	6,70	6,37
Maluku Utara	6,80	6,98	6,37	5,49	6,41
Papua Barat	3,64	3,63	7,39	5,38	5,01
Papua	-4,28	1,72	7,91	3,25	2,15

Sumber: BPS, 2014

Secara rata-rata dari tahun 2011-2014 yang berdasarkan **Tabel 4.2.**, provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki pertumbuhan ekonomi paling rendah. Pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat paling rendah karena tahun 2011 dan 2012 tumbuh negatif. Kondisi ini disebabkan oleh sektor pertambangan masih berada pada tren pertumbuhan negatif (BI, 2012). Struktur perekonomian provinsi Nusa Tenggara Barat menurut lapangan usaha didominasi oleh tiga kategori utama yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan Pertambangan dan Penggalan (BPS, 2014).

**Tabel 4.2.** juga menunjukkan bahwa secara rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi Papua terendah kedua setelah provinsi Nusa Tenggara Barat. Provinsi Papua yang kaya akan potensi sumber daya alam terutama sektor pertambangan. Sektor pertambangan telah mampu menyumbang lebih dari 50 persen perekonomian di Papua dengan komoditas tembaga, emas, minyak dan gas.

Selain sektor pertambangan, kegiatan perekonomian masyarakat dominan pada sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan. Pertumbuhan ekonomi provinsi Papua dari tahun 2011-2014 mengalami fluktuatif. Perbaikan kinerja sektor pertambangan dan penggalian yang dikontribusikan khususnya oleh peningkatan produksi PT. Freeport Indonesia yang melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan di Kabupaten Timika merupakan pendorong utama membaiknya pertumbuhan ekonomi secara tahunan di Provinsi Papua (Laporan Kajian Ekonomi Regional Provinsi Papua, 2010). Ekonomi Papua yang tumbuh sangat signifikan tahun 2013 yaitu tumbuh 7,91 persen terutama disebabkan oleh tingginya konsumsi (baik masyarakat maupun pemerintah) dan ekspor (BI 2013). Peningkatan kinerja sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, dan sektor keuangan menjadi penggerak utama peningkatan kinerja ekonomi Papua (BI, 2012).

#### **4.1.3. Kemiskinan**

Persoalan kemiskinan menjadi salah satu target kebijakan pembangunan di setiap negara agar kesenjangan pendapatan menjadi semakin kecil. Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi karena dalam menanggulangnya masalah yang dihadapi bukan saja terbatas pada hal-hal yang menyangkut hubungan sebab akibat timbulnya kemiskinan tetapi melibatkan juga preferensi, nilai dan politik. BAPPENAS (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara

lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari ancaman tindak kekerasan

**Tabel 4.3.**  
**Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Indonesia dengan Kategori *Lower-Medium* (satuan jiwa)**

Provinsi	2011	2012	2013	2014	Rata-Rata
Sumatera Selatan	1074810	1042000	1108210	1085800	1077705
Lampung	1298710	1219000	1134280	143940	948983
Nusa Tenggara Barat	894770	828300	802450	816620	835535
Nusa Tenggara Timur	1012900	1000300	1009150	991880	1003558
Kalimantan Barat	380110	355700	394170	381910	377973
Sulawesi Tengah	423630	409600	400090	387060	405095
Gorontalo	198270	187700	200970	195100	195510
Sulawesi Barat	164860	160600	154200	154690	158588
Maluku	360320	338900	322510	307020	332188
Maluku Utara	97310	88300	85820	84790	89055
Papua Barat	249840	223200	1057980	225460	439120
Papua	944790	976400	234230	864110	754883

Sumber: BPS, 2014

**Tabel 4.3** menunjukkan bahwa provinsi Sumatera Selatan secara rata-rata dari tahun 2011-2014 memiliki jumlah penduduk miskin paling tinggi yaitu sebesar 1.077.705 jiwa kemudian jumlah penduduk miskin tertinggi kedua yaitu provinsi Nusa Tenggara Timur dengan rata-rata jumlah kemiskinan sebesar 1.003.558 jiwa. Jumlah penduduk miskin di provinsi Sumatera Selatan disebabkan oleh jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan dan pedesaan mengalami peningkatan (BPS, 2014). Jumlah penduduk miskin di provinsi Nusa Tenggara Timur disebabkan oleh indeks harga pada sub kelompok padi-padian, umbi-umbian diperkotaan hasilnya mengalami kenaikan serta pertumbuhan ekonomi provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan perlambatan

#### 4.1.4. PDRB per Kapita

Suatu daerah yang memiliki PDRB per kapita yang tinggi umumnya memiliki *standard of living* yang juga tinggi. Perbedaan pendapatan mencerminkan perbedaan kualitas hidup: negara kaya (dicerminkan oleh pendapatan per kapita yang tinggi) memiliki kualitas hidup yang lebih baik (dicerminkan oleh, antara lain, angka harapan hidup, tingkat kesehatan, dan tingkat pendidikan) dibandingkan dengan negara miskin (Oktavia, 2008). Selain itu, kenaikan dalam pendapatan perkapita merupakan pencerminan dari timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat (Purba, 2011).

Menurut Mankiw (2006:25), faktor utama yang mempengaruhi perbedaan *standard of living* (ditunjukkan oleh perbedaan besar pendapatan per kapita) antara negara kaya dan negara miskin adalah tingkat produktivitas. Produktivitas mengacu pada jumlah barang dan jasa yang dapat dihasilkan oleh seorang pekerja dalam setiap jam. Dengan demikian, suatu negara dapat menikmati *standard of living* yang tinggi jika negara tersebut dapat memproduksi barang dan jasa dalam jumlah yang besar.

**Tabel 4.4** halaman 68 menunjukkan PDRB per kapita di 12 provinsi dengan *human development index* kategori *lower medium*. Papua Barat memiliki PDRB per kapita paling tinggi dibandingkan dengan 11 provinsi yang lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa *standard of living* Papua Barat tinggi. Kondisi ini juga menunjukkan kemakmuran (*wealth*), daya beli (*purchasing power parity*), dan kemajuan pembangunan Papua Barat. Kenaikan pendapatan perkapita mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat Papua Barat.

**Tabel 4.4.**  
**Perkembangan PDRB per Kapita di Provinsi Indonesia dengan Kategori**  
*Lower-Medium* (satuan dalam ribu rupiah)

Provinsi	2011	2012	2013	2014	Rata-Rata
Sumatera Selatan	27158	28578	29680	30628	29011
Lampung	20739	21795	22773	23649	22239
Nusa Tenggara Barat	14706	14277	14807	15352	14785
Nusa Tenggara Timur	9676	10031	10398	10742	10212
Kalimantan Barat	20227	21062	21970	22708	21492
Sulawesi Tengah	21106	22724	24481	25316	23407
Gorontalo	15688	16650	17641	18627	17151
Sulawesi Barat	16023	17169	18010	19211	17603
Maluku	12477	13129	13574	14230	13353
Maluku Utara	14995	15691	16335	16872	15973
Papua Barat	54540	55048	57595	59157	56585
Papua	36383	36280	38394	38892	37487

Sumber: BPS, 2014

#### 4.1.5. Upah Minimum

Pemerintah daerah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan memperhatikan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi. Usulan penetapan upah minimum kabupaten/kota dirumuskan oleh dewan pengupahan kabupaten/kota yang merupakan hasil pembahasan dengan Pemerintah, Serikat Pekerja (SP) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) (Fajarwati, 2011). Penetapan UMK disahkan oleh pemerintah daerah karena pemerintah daerah memiliki tugas menjadi perantara antara serikat pekerja dengan para pengusaha. Kebijakan upah minimum juga mempengaruhi permintaan tenaga kerja wanita.

Menurut Undang Undang No 13 tahun 2003 disebutkan bahwa upah minimum hanya ditujukan bagi pekerja dengan masa kerja 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) tahun. Dari definisi tersebut, terdapat dua unsur penting dari upah minimum (Sumarsono, 2003) yaitu adalah: a) Upah permulaan adalah upah

terendah yang harus diterima oleh buruh pada waktu pertama kali dia diterima bekerja. b) Jumlah upah minimum haruslah dapat memenuhi kebutuhan hidup buruh secara minimal yaitu kebutuhan untuk sandang, pangan dan keperluan rumah tangga.

**Tabel 4.5.**  
**Perkembangan Upah Minimum di Provinsi Indonesia dengan Kategori**  
***Lower-Medium* (satuan dalam ribu rupiah)**

Provinsi	2011	2012	2013	2014	Rata-Rata
Sumatera Selatan	1048440	1195220	1630000	1825000	1424665
Lampung	855000	975000	1150000	1399037	1094759
Nusa Tenggara Barat	950000	1000000	1100000	1210000	1065000
Nusa Tenggara Timur	850000	925000	1010000	1150000	983750
Kalimantan Barat	802500	900000	1060000	1380000	1035625
Sulawesi Tengah	827500	885000	995000	1250000	989375
Gorontalo	762500	837500	1175000	1325000	1025000
Sulawesi Barat	1006000	1127000	1165000	1400000	1174500
Maluku	900000	975000	1275000	1415000	1141250
Maluku Utara	889350	960498	1200622	1440746	1122804
Papua Barat	1410000	1450000	1720000	1870000	1612500
Papua	1403000	1585000	1710000	1900000	1649500

Sumber: BPS,2014

Berdasarkan **Tabel 4.5** upah minimum 12 provinsi dengan ketegori *lower medium* terus mengalami peningkatan setiap tahun. Upah minimum di 12 provinsi tersebut berbeda-beda. Perbedaan upah minimum disebabkan oleh perbedaan sumber daya, produktivitas, pertumbuhan ekonomi, kebutuhan hidup layak, dan tingkat inflasi. Permasalahan yang dihadapi oleh para pekerja/buruh yaitu masih banyak ditemukan perusahaan yang memberikan upah dibawah upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, sehingga dapat dikatakan sebagai perusahaan tidak taat upah minimum, kenyataannya upah minimum masih jauh dari kebutuhan dasar pekerja, sehingga belum berhasil menciptakan hubungan industrial seperti yang diharapkan.

## 4.2. Analisis Model dan Pembuktian Hipotesis

### 4.2.1. Pemilihan Model Estimasi Data Panel

Pemilihan model regresi data panel menggunakan uji chow untuk memilih antara PLS dan FEM, hipotesis nolnya ( $H_0$ ) adalah PLS dan hipotesis alternatifnya ( $H_1$ ) FEM . Uji Hausman untuk memilih antara REM dan FEM, hipotesis nolnya ( $H_0$ ) adalah REM dan hipotesis alternatifnya ( $H_1$ ) adalah FEM. **Tabel 4.6.** menyajikan pengujian pemilihan model data 12 provinsi dengan kategori *lower medium*. Uji Chow menunjukkan bahwa model FEM yang terpilih karena prob uji Chow ( $0,0000$ )  $< 5\%$  sedangkan uji Hausman juga menunjukkan bahwa model FEM yang terbaik karena prob uji Hausman ( $0,0000$ )  $< 5\%$ .

**Tabel 4.6.**  
**Hasil Pemilihan Model Regresi Panel**

PLS atau FEM	FEM atau REM
H0: PLS H1: FEM $\alpha = 5\%$ Kriteria Pengujian: H0 ditolak jika prob uji Chow $< 5\%$ H0 diterima jika prob uji Chow $\geq 5\%$ Kesimpulan: Prob uji Chow = 0,0000 Jadi, H0 ditolak karena prob uji Chow ( $0,0000$ ) $< 5\%$ sehingga model FEM yang terbaik	H0: REM H1: FEM $\alpha = 5\%$ Kriteria Pengujian: H0 ditolak jika prob uji Hausman $< 5\%$ H0 diterima jika prob uji Hausman $\geq 5\%$ Kesimpulan: Prob uji Hausman = 0,0000 Jadi, H0 ditolak karena prob uji Hausman ( $0,0000$ ) $< 5\%$ sehingga model FEM yang terbaik dan terpilih.

Sumber: Hasil Perhitungan dengan STATA 13

### 4.2.2. Identifikasi Model Terpilih Regresi Data Panel

Berdasarkan hasil dari uji *Chow* dan uji Hausman, metode yang terbaik adalah metode FEM. Hasil FEM menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, dan upah minimum berpengaruh signifikan terhadap *human development index* di provinsi dengan kategori *lower medium* sedangkan jumlah

penduduk miskin (*poverty*) tidak berpengaruh signifikan terhadap *human development index* di provinsi dengan kategori *lowe medium*.

**Tabel 4.7.**  
**Hasil Estimasi FEM**

Variabel	Parameter	Ruang Lingkup	Model Estimasi
			FEM
Konstanta	$\hat{\alpha}$	Koefisien	-40,96
		Standar Error	12,56
		Prob.	0,003***
Pertumbuhan Ekonomi (EG)	$\hat{\beta}_1$	Koefisien	0,068
		Standar Error	0,019
		Prob.	0,001***
Log( <i>Poverty</i> )	$\hat{\beta}_2$	Koefisien	-0,042
		Standar Error	0,101
		Prob.	0,681
Log (PDRB per Kapita)	$\hat{\beta}_3$	Koefisien	7,595
		Standar Error	1,912
		Prob.	0,000***
Log (Upah Minimum)	$\hat{\beta}_4$	Koefisien	2,055
		Standar Error	0,554
		Prob.	0,001***
Prob F			0,000***

Keterangan:

\*\*\* menunjukkan tingkat signifikansi pada level 1%

\*\* menunjukkan tingkat signifikansi pada level 5%

\* menunjukkan tingkat signifikansi pada level 10%

#### 4.2.3. Uji T untuk Model Regresi Data Panel Terpilih

1. Koefisien regresi variable pertumbuhan ekonomi terhadap *human development index* adalah sebesar 0,068 dengan nilai probabilitas 0,001 yang artinya lebih kecil dari  $\alpha$  (5%). Hasil berada di daerah  $H_0$  ditolak, sehingga parameter ini signifikan dan berpengaruh terhadap *human development index*. Nilai koefisien sebesar 0,068 menunjukkan hubungan positif antara kedua variable tersebut.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan *human development index* dapat diinterpretasikan jika terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% maka *human development index* akan meningkat sebesar 0,068% satuan, dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.

2. Koefisien regresi variabel kemiskinan terhadap *human development index* adalah sebesar (-0,042) dengan nilai probabilitas 0,681 yang artinya lebih besar dari  $\alpha$  (1%, 5%, dan 10%). Hasil berada di daerah  $H_0$  diterima, sehingga parameter ini tidak dapat dipakai sebagai estimator yang signifikan dan tidak dapat mempengaruhi variabel dependen *human development index*.
3. Koefisien regresi variabel PDRB perkapita terhadap *human development index* adalah sebesar 7,595 dengan nilai probabilitas 0,000 yang artinya lebih kecil dari  $\alpha$  (5%). Hasil berada di daerah  $H_0$  ditolak, sehingga parameter ini signifikan dan berpengaruh terhadap *human development index*. Nilai koefisien sebesar 7,595 menunjukkan hubungan positif antara kedua variabel tersebut. Hubungan antara PDRB perkapita dan *human development index* dapat diinterpretasikan jika terjadi peningkatan PDRB perkapita sebesar 1% maka *human development index* akan meningkat sebesar 7,595% satuan, dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.
4. Koefisien regresi variabel upah minimum terhadap *human development index* adalah sebesar 2,055 dengan nilai probabilitas 0,001 yang artinya lebih kecil dari  $\alpha$  (5%). Hasil berada di daerah  $H_0$  ditolak, sehingga parameter ini signifikan dan berpengaruh terhadap *human development index*. Nilai koefisien sebesar 2,055 menunjukkan hubungan positif antara kedua variabel tersebut.

Hubungan antara upah minimum dan *human development index* dapat diinterpretasikan jika terjadi peningkatan upah minimum sebesar 1% maka *human development index* akan meningkat sebesar 2,055% satuan, dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.

#### 4.2.4. Uji F untuk Model Regresi Data Panel Terpilih

Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai probabilitas F-statistik untuk model FEM pada penelitian ini sebesar 0,0000. Angka ini menunjukkan bahwa nilai dari probabilitas F-statistik kurang dari tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$ , sehingga  $H_0$  ditolak atau  $H_1$  diterima. Hal ini berarti secara simultan variabel pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, PDRB per kapita, dan upah minimum berpengaruh signifikan terhadap *human development index*.

#### 4.2.5. Pembuktian Hipotesis

Berdasarkan analisis regresi data panel, maka pembuktian hipotesis sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama studi ini yaitu diduga pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, PDRB per kapita, dan upah minimum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *human development index* di 12 provinsi Indonesia. Berdasarkan uji F (uji simultan) hipotesis tersebut dapat diterima karena secara simultan variabel pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, PDRB per kapita, dan upah minimum berpengaruh signifikan terhadap *human development index*.
2. Hipotesis kedua dari studi ini yaitu diduga pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, PDRB per kapita, dan upah minimum secara parsial

berpengaruh signifikan terhadap *human development index* di 12 provinsi Indonesia. Berdasarkan hasil uji t, hipotesis variabel pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, dan upah minimum secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *human development index* di 12 provinsi Indonesia dapat diterima sedangkan hipotesis yang diduga kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap *human development index* di 12 provinsi Indonesia tidak dapat diterima.

#### **4.3. Pembahasan**

Berdasarkan hasil regresi data panel, pembahasan untuk pengaruh masing-masing variabel independen terhadap dependen dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap *Human Development Index***

Kuznets dalam Arsyad (2010:125) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang pada kemampuan suatu negara dalam menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya; kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan serta ideologis yang diperlukannya. Kuznets dalam Arsyad (2010:128) menyatakan pengertian pertumbuhan ekonomi dapat dibagi dalam empat kriteria. Pertama, adanya peningkatan dalam permintaan konsumen sejalan dengan peningkatan pendapatan. Kedua, adanya peningkatan sumber daya manusia dan fisik pada kecepatan yang melebihi pertumbuhan tenaga kerja. Ketiga, adanya peningkatan kapasitas teknologi karena adanya inovasi-inovasi baru. Keempat, keterbukaan wilayah terhadap perdagangan internasional dan aliran modal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Pertumbuhan ekonomi sekarang dipandang memiliki peranan mendorong pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia memiliki keterkaitan dan saling berkontribusi satu sama lain (Anggraini, 2012). UNDP (2011) mengungkapkan bahwa kualitas pembangunan manusia dapat mengalami peningkatan apabila didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan diimbangi dengan pemerataan pendapatan sehingga pertumbuhan ekonomi akan sangat efektif untuk memperbaiki pembangunan manusia.

Koefisien pertumbuhan ekonomi sebesar 0,068 sehingga peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen menyebabkan peningkatan *human development index* sebesar 0,068 satuan, asumsi *ceteris paribus*. Hasil estimasi nilai probabilitas variabel pertumbuhan ekonomi lebih kecil dari *level of significance* 5% sehingga pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap *human development index*. Hasil studi ini sejalan dengan penelitian Mirza (2012), Hukom (2015), Chalid dan Yusuf (2014). Penelitian mereka menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan.

Signifikansi pertumbuhan ekonomi terhadap *human development index* memberikan indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi di 12 provinsi dengan kategori *lower medium* menjadi unsur penting dalam peningkatan *human development index*. Peningkatan pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan daya beli konsumen di 12 provinsi dengan kategori *lower medium*. Adanya peningkatan daya beli konsumen menyebabkan peningkatan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Kondisi ini menguntungkan bagi pemerintah daerah di 12 provinsi dengan kategori *lower medium* karena pendapatan pemerintah mengalami

peningkatan. Pertumbuhan ekonomi memberikan kontribusi terhadap *human development* melalui pendapatan rumah tangga dan pengeluaran pemerintah pusat maupun pengeluaran pemerintah daerah (Ranis dan Steward, 2001).

Kecenderungan rumah tangga menghabiskan pendapatannya untuk barang yang berkontribusi langsung pada *human development*, misalnya, makanan, air minum, pendidikan dan kesehatan akan mempengaruhi pola rumah tangga dan alokasi belanja sehingga berdampak pada peningkatan pembangunan manusia. Beralih pada kebijakan pengeluaran pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan *human development*. UNDP (1991) dalam Ranis dan Steward (2001) menyebutkan dua rasio untuk meningkatkan *human development* yaitu rasio pengeluaran publik, dan rasio alokasi sosial. Pertama, rasio pengeluaran publik, yang didefinisikan sebagai proporsi antara pengeluaran sektor publik terhadap PDB (jika skala nasional) sedangkan proporsi antara pengeluaran sektor publik terhadap PDRB (jika skala daerah). Kedua, rasio alokasi sosial, yang didefinisikan proporsi pengeluaran total pemerintah yang ditujukan untuk sektor *human development* terhadap PDB (jika skala nasional) sedangkan proporsi pengeluaran total pemerintah yang ditujukan untuk sektor *human development* terhadap PDRB (jika skala daerah). Kedua rasio tersebut mengindikasikan besarnya peran pemerintah terhadap peningkatan pembangunan manusia.

## **2. Pengaruh Kemiskinan Terhadap *Human Development Index***

Fenomena kemiskinan di 12 provinsi Indonesia dengan kategori *lower medium* telah berlangsung sejak lama. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam mengurangi tingkat

kemiskinan seperti: penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir melalui sistem kredit, pembangunan prasarana dan pendampingan, penyuluhan sanitasi dan sebagainya (Prawoto, 2009). Strategi penanggulangan kemiskinan tersebut, semuanya berorientasi material, sehingga keberlanjutannya sangat tergantung pada ketersediaan anggaran dan komitmen pemerintah daerah maupun pusat.

Masalah kemiskinan menyebabkan masyarakat rela mengorbankan apa saja demi keselamatan hidup, *safety life*, mempertaruhkan tenaga fisik untuk memproduksi keuntungan bagi tengkulak lokal dan menerima upah yang tidak sepadan dengan biaya tenaga yang dikeluarkan (James. C.Scott, 1981, dalam Prawoto, 2005). Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas (Prawoto, 2005).

Akar permasalahan kemiskinan di Indonesia yakni tingginya disparitas antar daerah akibat tidak meratanya dsistribusi pendapatan, sehingga kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin di Indonesia semakin melebar. Faktor lain penyebab kemiskinan meningkat yaitu kebijakan pemerintah

menaikkan harga BBM, Tarif telepon, dan Tarif dasar listrik secara otomatis di ikuti oleh kenaikan harga barang dan jasa yang lain (Purwanto, 2005).

Koefisien kemiskinan sebesar  $-0,042$  sehingga peningkatan kemiskinan sebesar 1 persen menyebabkan penurunan *human development index* sebesar  $0,042$  satuan, asumsi *ceteris paribus*. Hasil estimasi menunjukkan nilai probabilitas variabel kemiskinan lebih besar dari 5 persen sehingga variabel kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap *human development index*. Hasil studi ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu.

Ketidak signifikansi kemiskinan terhadap *human development index* di 12 provinsi Indonesia dengan kategori *lower medium* menunjukkan bahwa terjadi penguatan daya beli masyarakat miskin di 12 provinsi di Indonesia dengan kategori *lower medium*, hal ini juga menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok cukup tinggi. Daya beli masyarakat merupakan salah satu indikator komposit *human development index*. Strategi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat yaitu, pemerintah perlu menjamin stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat dan menjaga ketersediaannya di pasar maupun gudang dalam bentuk cadangan atau persediaan. Ketidakstabilan harga kebutuhan pokok yang tidak terkendali bisa menimbulkan inflasi yang tinggi (hiperinflasi) dan dapat menimbulkan ketidakstabilan politik (Widodo dkk, 2011). Ketidak signifikansi pengaruh kemiskinan terhadap *human development index* juga menunjukkan bahwa masalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat untuk dapat mencapai atau mendapatkan kebutuhan dasarnya

yang seharusnya menjadi haknya sebagai manusia dan sebagai warga negara telah terpenuhi.

### 3. Pengaruh PDRB per kapita Terhadap *Human Development Index*

Menurut Arsyad (2010:28), pembangunan ekonomi adalah sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan per kapita penduduk suatu negara. Pendapatan per kapita menjadi ukuran yang lebih baik untuk mengukur standar hidup masyarakat di suatu negara (Mankiw, 2006:23). Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara (Arsyad, 2010:35). Variabel yang digunakan untuk menghitung pendapatan per kapita adalah PDB atau PDRB dan jumlah penduduk. Manfaat perhitungan PDRB per kapita sebagai indikator ekonomi yang mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah antara lain sebagai berikut (Purba, 2011): (1) untuk melihat tingkat perbandingan kesejahteraan masyarakat suatu daerah dari tahun ke tahun, (2) sebagai data perbandingan tingkat kesejahteraan suatu daerah dengan suatu daerah lain, (3) sebagai perbandingan tingkat standar hidup suatu daerah dengan suatu daerah lainnya, dan (4) sebagai data untuk mengambil kebijakan di bidang ekonomi.

Koefisien PDRB per kapita sebesar 7,595 sehingga peningkatan PDRB per kapita sebesar 1 persen menyebabkan peningkatan *human development index* sebesar 7,595 satuan, asumsi *ceteris paribus*. Hasil estimasi menunjukkan bahwa nilai probabilitas variabel PDRB per kapita lebih kecil dari 5 persen sehingga variabel PDRB per kapita berpengaruh signifikan terhadap *human development index*. Hasil studi ini sejalan dengan penelitian Ananta (2012). Hasil penelitian

Ananta (2012) menunjukkan bahwa PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan.

Koefisien PDRB per kapita paling besar dibandingkan dengan koefisien variabel lain seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan upah minimum. Hasil ini tak lain karena dengan adanya peningkatan PDRB per kapita akan langsung dirasakan masyarakat manfaatnya untuk meningkatkan kualitas hidupnya, saat dirasa ingin meningkatkan pengetahuannya, dapat langsung membeli buku yang diperlukan, saat sedang sakit bisa langsung berobat ke dokter ataupun rumah sakit. Peningkatan PDRB per kapita, seseorang dapat meningkatkan daya belinya (konsumsi) guna peningkatan kualitas hidupnya.

Norton (2002) menyatakan bahwa apabila pertumbuhan PDRB per kapita tinggi berarti terdapat lebih banyak pekerjaan yang lebih baik dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi, Secara ekonomi makro, PDRB per kapita dapat mempengaruhi *human development index*. Peningkatan PDRB per kapita akan meningkatkan standar hidup layak masyarakat sehingga daya beli juga mengalami peningkatan. Peningkatan daya beli berdampak pada peningkatan *human development index*.

#### **4. Pengaruh Upah Minimum Terhadap *Human Development Index***

Masalah tenaga kerja tidak terlepas dari upah minimum regional (UMR). Upah minimum ini merupakan salah satu pertimbangan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya disuatu daerah terutama investor yang ingin mendirikan pabrik atau industri yang banyak menyerap tenaga kerja semakin tinggi upah minimum regional suatu daerah menunjukkan semakin tinggi tingkat ekonominya

(Bappeda. 2010, dalam Chalid, 2014). Upah minimum ada bertujuan untuk (a) menjamin penghasilan pekerja sehingga tidak lebih rendah dari suatu tingkat tertentu, (b) meningkatkan produktivitas pekerja, (c) mengembangkan dan meningkatkan perusahaan dengan cara-cara produksi yang lebih efisien (Sumarsono, 2003).

Koefisien Upah Minimum sebesar 2,055 sehingga peningkatan upah minimum sebesar 1 persen menyebabkan peningkatan *human development index* sebesar 2,055 satuan, asumsi *ceteris paribus*. Hasil estimasi menunjukkan bahwa nilai probabilitas upah minimum lebih kecil dari 5 persen, sehingga variabel upah minimum berpengaruh signifikan terhadap *human development index*. Hasil studi ini sejalan dengan penelitian Chalid dan Yusuf (2014). Hasil penelitian Chalid dan Yusuf (2014) juga menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh positif terhadap *human development index*.

Peningkatan upah minimum di 12 provinsi Indonesia dengan kategori *lower medium* akan meningkatkan kebutuhan hidup layak sehingga standar hidup layak juga mengalami peningkatan. Upah (*wage*) adalah salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pemerintah telah terlibat dalam menangani masalah pengupahan melalui berbagai kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 ayat 1, disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Salah satu alasan ditetapkannya upah minimum adalah sebagai jaring pengaman sosial untuk memastikan upah tidak semakin merosot,

serta mempersempit kesenjangan ekonomi. Jumlah upah minimum haruslah dapat memenuhi kebutuhan hidup buruh secara minimal yaitu kebutuhan untuk sandang, pangan dan keperluan rumah tangga. Akibat peningkatan upah minimum yang diterima, daya beli masyarakat mengalami peningkatan sehingga berdampak positif pada *human development index* di 12 provinsi Indonesia dengan kategori *lower medium*.



## BAB 5

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab empat mengenai *human development index* maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

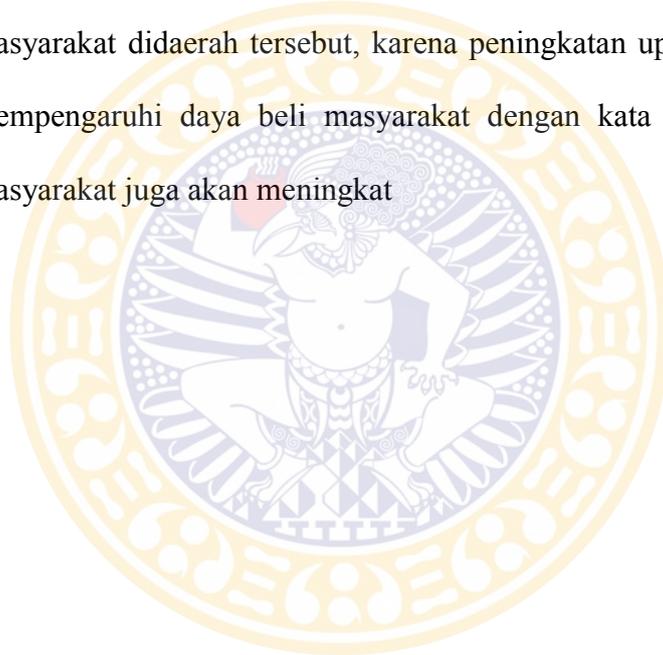
1. Hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, PDRB per kapita, dan upah minimum Secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *human development index* di 12 provinsi Indonesia dengan kategori *lower medium*.
2. Hipotesis kedua secara parsial menunjukkan bahwa:
  - a. Variabel pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap *human development index* di 12 provinsi Indonesia dengan kategori *lower medium*.
  - b. Variabel PDRB per kapita secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap *human development index* di 12 provinsi Indonesia dengan kategori *lower medium*.
  - c. Variabel upah minimum secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap *human development index* di 12 provinsi Indonesia dengan kategori *lower medium*.
  - d. Variabel kemiskinan secara parsial berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap terhadap *human development index*, di 12 provinsi Indonesia dengan kategori *lower medium*.

## 5.2. Saran

Berdasarkan simpulam yang telah dilakukan sebelumnya, maka saran yang dapat direkomendasikan dari penelitian ini adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap *human development index* di 12 provinsi Indonesia dengan kategori *lower medium* sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan *human development index* disarankan untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menerapkan kebijakan fiskal ekspansif terutama disektor belanja modal pemerintah, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, dan menarik investor untuk menginjeksi dana asing ke 12 provinsi Indonesia dengan kategori *lower medium*. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka akan meningkatkan pembangunan ekonomi yang nantinya juga akan berpengaruh pada pembangunan manusia dan kesejahteraan msyarakat.
2. PDRB per kapita berpengaruh signifikan terhadap *human development index* di 12 provinsi Indonesia dengan kategori *lower medium* sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan *human development index* diharapkan meningkatkan jumlah PDRB disertai dengan kebijakan kebijakan lain yang dapat mendorong penekan jumlah penduduk sebab peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun akan membuat peningkatan PDRB per kapita menjadi lambat.
3. Upah minimum berpengaruh signifikan terhadap *human development index* di 12 provinsi Indonesia dengan kategori *lower medium* sehingga

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, para pengusaha, dan para buruh dapat menentukan jumlah upah minimum yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perekonomian di daerah tersebut, agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup dan memiliki standar hidup layak yang baik. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan *human development index* diharapkan selalu memperhatikan kebijakan Peningkatan upah minimum yang diterima masyarakat di daerah tersebut, karena peningkatan upah minimum akan mempengaruhi daya beli masyarakat dengan kata lain kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat



## DAFTAR PUSTAKA

- Ananta, Prayudha. 2013. Determinants Of Human Development In Lampung Province. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol 2. No. 3.
- Anggraini, Rinda Ayun. 2012. *Pola Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2011*. Jurnal Ilmiah Universitas Diponegoro.
- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2008. *Statistik Daerah Provinsi Jawa Timur*.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Statistik Daerah Provinsi Jawa Timur*.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Statistik Daerah Provinsi Jawa Timur*.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Statistik Daerah Provinsi Jawa Timur*.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Statistik Daerah Provinsi Jawa Timur*.
- Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional , United Nations Development Programme (2011) *Indonesia Human Development Report 2011*, Jakarta: BPS.
- Bank Indonesia. 2012. *Kajian Ekonomi Nusantara*. Jakarta: Bank Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Kajian Ekonomi Regional Papua*. Jakarta: Bank Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Kajian Ekonomi Regional Papua*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bappenas. 2010. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014*. Buku II. Jakarta: Bappenas.
- Barro, Robert J. 2003. *Determinants of Economic Growth in a Panel of Countries*. *Annals of Economics and Finance* 4, Page: 231–274.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Economic Growth*, 2nd edition. Cambridge: MIT Press.
- Becker, Gary S. 1993. *A Theory of Allocation of Time*. *The Economic Journal*. Vol 75 (9):493-517
- Bellante, Don, dan Jackson M. 1990. *Ekonomi Ketenagakerjaan*. Jakarta: LPFE UI
- Borjas, George J. 2013. *Labor Economics sixth edition*. New York : Mc-Graw-Hill Companies, Inc.
- Chalid, Nursiah, dan Yusuf Yusbar. 2014. Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi*. Volume 22, Nomor 2

- Dornbusch, Rudiger dan Stanley Fischer. 2008. *Makroekonomi*. Alih bahasa Julius A. Mulyadi. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Ehenberg, Ronald G dan Robert G. Smith. 2002. *Modern Labor Economics: Theory and Public Policy*. Prentice Hall. New Jersey.
- Fajarwati, Diana. 2011. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perumusan Upah Minimum Kota Bekasi Tahun 2010. *JRAK*. Vol.2. No.1.
- Faqihudin, M. 2008. *Human Development Index (HDI) Salah Satu Indikator yang Populer untuk Mengukur Kinerja Pembangunan Manusia*. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi
- Gianie. 2009. Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Industri dan Perdagangan. *Jurnal Ekonomi-Sosial*. Volume 10. Nomor 2. Hal: 105 – 115.
- Ginting S, Charisma Kuriata, Irsad Lubis, Dan Kasyful Mahalli. 2008. Pembangunan Manusia Di Indonesia Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. *Jurnal Perencanaan & Pengembangan Wilayah*. Vol.4. No.1. Hal 17-24.
- Gujarati, Damodar N. dan Dawn C. Porter. *Dasar Dasar Ekonometrika*. Edisi Kelima Buku 2. Terjemahan oleh Raden Carlos Mangunsong. 2012. Jakarta: Salemba Empat.
- Hukom, Alexandra. 2015. Effect Of Capital Expenditures, Economic Growth And Poverty On Human Development In Central Kalimantan. *IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)*. Volume 6. Issue 6. Page: 19-27.
- Jhingan. 2004. *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kuncoro, Mudrajad. 2010. *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan*, UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Lucas, R.E. 1988. On the Mechanics of Economic Development. *Journal of Monetary Economics*, 22 (1): 3-42.
- Mailendra, Fitra. 2009. *Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Manusia Di Propinsi Jawa Barat (Analisis Panel Data : Kabupaten/Kota Di Jawa Barat Periode 2002-2006)*. Jurnal Ilmiah Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.
- Mankiw, N. Gregory. *Makroekonomi*. Edisi Keenam. Terjemahan oleh Fitria Liza dan Imam Nurmawan. 2006. Jakarta: Erlangga.
- Melliana dan Ismaini, Zain. 2013. Analisis Statistika Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan Menggunakan Regresi Panel. *Jurnal Sains dan Seni Pomits*. Vol. 2 (2).

- Mirza, Denni Sulistio. 2012. Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. *Economics Development Analysis Journal*. Vol 1 (1).
- Momongan, Junaidi. E. 2013. Investasi PMA dan PMDN Pengaruhnya Terhadap Perkembangan PDRB Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Penanggulangan Kemiskinan di Sulawesi Utara. *Jurnal Emba*. Vol.1 No.3. Hal. 530-539
- Muhammad, dkk. 2010. Impact of Globalization on HDI (Human Development Index):Case Study of Pakistan. *European Journal of Social Sciences*. Volume 13. Nomor 1 (2010)
- Norton, Cebula. 2002. The Impact of Economic Freedom on Per Capita Real GDP: A Study of OECD Nations. *JRAP*. 43(1): 34-41.
- Oktavia, Nadia Maharani. 2008. *Analisis Penawaran Tenaga Kerja Wanita Menikah Dan Faktor yang Mempengaruhinya Di Kabupaten Brebes*. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Pratiwi, Sudiharta, dan Sutrisna Ketut. 2014. Pengaruh Pdrb Per Kapita, Pendidikan, Dan Produktivitas Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*. 3 [10] : 431-439.
- Prawoto, Nano. 2009. Memahami Kemiskinan Dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*. Volume 9, Nomor 1. Halaman: 56 - 68.
- Purba, Muhamad Asa'at. 2011. *Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita, Impor, Penanaman Modal Asing, Penanamanmodal Dalam Negeri Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Laju Inflasi Di Indonesia Priode Tahun 1979-2009*. Jurnal Ilmiah Universitas Tidar Magelang.
- Ranis, Gustav and Stewart, Frances, 2001. *Dynamic Links between the Economy and Human Development*. DESA Working Paper No. 8. Washington D.C.: World Bank
- Romer, Paul M. 1986. Increasing Return and Long-Run Growth. *Journal of Political Economy*. 94:5, 100-237.
- \_\_\_\_\_. 1990. Endogeneous Technological Change. *Journal of Political Economy*. 98, 71-102.
- Simamora. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Adi Citra Karya Nusa.
- Simanjutak, Payaman J. 2001. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Schultz, Robert T. 2005. *The Economic Importance Of Human Capital In Modernization*. *Education Economics*, 1(1), 13-19.
- Sirojuzilam dan Kasyful Mahalli. 2010. *Regional Pembangunan, Perencanaan dan Ekonomi*. Medan: USU Press.

- Suliswanto, Muhammad Sri W. 2010. Pengaruh Produk Domestik Bruto (Pdb) Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Angka Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol 8 No. 2.
- Sulistiawati, Rini. 2012. Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Sosial*. Volume 8. Nomor 3. Hal: 195 – 211.
- Sukirno, Sadono.. 2010. *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Raja Grasindo Perseda
- Sumarsono, Edi. 2003. Kebijakan Upah Minimum Untuk Perekonomian Yang Berkeadilan: Tinjauan Uud 1945. *Journal of Indonesian Applied Economics*. Vol. 5 No. 2. Page: 269-285.
- Susanti, H. 2000. *Indikator-Indikator Makro Ekonomi*, Edisi Kedua, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Syamsudin, H. 2012. Analisis Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode 2007-2011. *Jurnal Paradigma Ekonomika*. Vol.1, No.6.
- Todaro, M.P. dan Smith, S.C. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Terjemahan oleh Haris Munandar, Pujia A.L. Jilid 1. Edisi Kesembilan. Jakarta: Erlangga.
- UNDP. 2011. *Human Development Report*. (<http://www.hdr.undp.org.id>, diakses tgl 23 Juni 2016).
- Usman, Abdhul Aziiz. 2003. Identifikasi Karakteristik Rumah Tangga Miskin Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol 18, No. 4. Halaman: 86-97.
- Wicaksono, Muhammad Nur. 2014. *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Angkatan Kerja, Dan Belanja Modal Daerah Terhadap Peningkatan PDRB Provinsi Di Indonesia Tahun 2008-2012*. Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya.
- Widarjono, Agus, 2009. *Ekonometrika: Pengantar Dan Aplikasinya*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Ekonisia.
- Widodo dkk. 2011. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*. Volume 1. Nomor 1.
- Yunitasari, Maria. 2007. *Analisis Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Dengan Pembangunan Manusia Propinsi Jawa Timur*. Skripsi. Bogor: Departemen Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian IPB.

## Lampiran

### 1. Hasil Uji PLS

```
. reg hdi eg lpov lpdrbkapita lump
```

Source	SS	df	MS	Number of obs =	48
Model	84.8876298	4	21.2219075	F( 4, 43) =	2.90
Residual	314.84192	43	7.32190512	Prob > F =	0.0329
Total	399.72955	47	8.50488404	R-squared =	0.2124
				Adj R-squared =	0.1391
				Root MSE =	2.7059

hdi	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
eg	.3402401	.1496076	2.27	0.028	.0385276 .6419526
lpov	.1695926	.5118233	0.33	0.742	-.8625976 1.201783
lpdrbkapita	-1.8887	1.135936	-1.66	0.104	-4.179534 .4021335
lump	.1813051	2.155417	0.08	0.933	-4.165508 4.528118
_cons	75.19714	26.147	2.88	0.006	22.46668 127.9276

### 2. Hasil Uji FEM

```
. xtreg hdi eg lpov lpdrbkapita lump, fe
```

```
Fixed-effects (within) regression      Number of obs   =    48
Group variable: kode                  Number of groups =   12

R-sq:  within = 0.9214                 Obs per group:  min =    4
      between = 0.1449                 avg             =   4.0
      overall  = 0.0993                 max             =    4

corr(u_i, Xb) = -0.8630                F(4,32)         =   93.82
                                          Prob > F         =   0.0000
```

hdi	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
eg	.0676189	.0190054	3.56	0.001	.0289062 .1063316
lpov	-.0420225	.1013685	-0.41	0.681	-.2485033 .1644583
lpdrbkapita	7.594648	1.912529	3.97	0.000	3.698953 11.49034
lump	2.055203	.5545431	3.71	0.001	.9256355 3.18477
_cons	-40.96036	12.56325	-3.26	0.003	-66.55086 -15.36986
sigma_u	5.6465634				
sigma_e	.25346371				
rho	.99798911	(fraction of variance due to u_i)			

```
F test that all u_i=0:      F(11, 32) = 442.61      Prob > F = 0.0000
```

### 3. Hasil Uji Rem

```
. xtreg hdi eg lpov lpdrbkapita lump, re

Random-effects GLS regression           Number of obs   =       48
Group variable: kode                   Number of groups =       12

R-sq:  within = 0.9006                  Obs per group:  min =       4
      between = 0.1980                      avg =       4.0
      overall  = 0.0784                      max =       4

corr(u_i, X) = 0 (assumed)              Wald chi2(4)    =    247.43
                                           Prob > chi2     =    0.0000
```

hdi	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
eg	.0634575	.0227687	2.79	0.005	.0188318	.1080833
lpov	-.0648575	.1212025	-0.54	0.593	-.3024101	.172695
lpdrbkapita	2.003381	1.620028	1.24	0.216	-1.171814	5.178577
lump	3.494477	.5135344	6.80	0.000	2.487968	4.500986
_cons	-5.141454	11.01275	-0.47	0.641	-26.72605	16.44314
sigma_u	2.7141286					
sigma_e	.25346371					
rho	.99135431	(fraction of variance due to u_i)				

### 4. Hasil Uji Hausman

```
. hausman fe re

----- Coefficients -----
      (b)      (B)      (b-B)      sqrt(diag(V_b-V_B))
      fe      re      Difference      S.E.
-----+-----
      eg      .0676189   .0634575   .0041614      .
      lpov     -.0420225  -.0648575   .022835      .
      lpdrbkapita  7.594648   2.003381   5.591266   1.016504
      lump     2.055203   3.494477  -1.439274   .2092857

      b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
      B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

Test: Ho: difference in coefficients not systematic

      chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
              = 30.22
      Prob>chi2 = 0.0000
      (V b-V B is not positive definite)
```